



**KEBIJAKAN PEMERINTAH ITALIA DALAM MERESPON
TUNTUTAN REFERENDUM VENESIA**

*(The Policy of Italian Government Response In
Referendum Demands of Venice)*

SKRIPSI

Oleh

Ade Prasetyo Harista

NIM 080910101006

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**KEBIJAKAN PEMERINTAH ITALIA DALAM MERESPON
TUNTUTAN REFERENDUM VENESIA**

*(The Policy Of Italian Government Response In
Referendum Demands Of Venice)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

Ade Prasetyo Harista

NIM 080910101006

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda Siti Rumsiyani dan Ayahanda Saiwar tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanannya, baik materiil maupun non materiil selama ini;
2. Guru-guruku mulai SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan mendidik dengan penuh kesabaran dan dedikasi;
3. Almamater.

MOTTO

Tidak ada yang tidak mungkin apabila kita mempunyai niat yang kuat dalam hati, usaha keras untuk mengerjakan dan tawakkal kepada-Nya dalam menanti hasil.*

*Penulis

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ade Prasetyo Harista
NIM : 080910101006
Jurusan : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Institusi : Universitas Jember

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “Kebijakan Pemerintahan Italia Dalam Merespon Tuntutan Referendum Venesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Desember 2015

Yang menyatakan,

Ade Prasetyo Harista
NIM.080910101006

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH ITALIA DALAM MERESPON
TUNTUTAN REFERENDUM VENESIA**

Oleh

Ade Prasetyo Harista

NIM. 080910101006

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

Dosen Pembimbing II : Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintah Italia Dalam Merespon Tuntutan Referendum Venesia” telah diuji dan disahkan pada:

hari/tanggal : Rabu, 30 Desember 2015

waktu : 13.00 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua,

Fuat Albayumi, S.IP, MA
NIP. 197404242005011002

Sekretaris I,

Sekretaris II,

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph. D
NIP. 196802291998031001

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M. Si
NIP. 197212041999031004

Anggota I,

Anggota II,

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum
NIP. 195904231987021001

Drs. Djoko Susilo, M. Si
NIP. 195908311989021001

Mengesahkan,
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Kebijakan Pemerintah Italia Dalam Merespon Tuntutan Referendum Venesia;
Ade Prasetyo Harista 2015:93 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Referendum merupakan salah satu cara bagi daerah - daerah yang memilih untuk melepaskan diri sebagai Negara sendiri untuk mengatur segala pemerintahan. Venesia merupakan salah satu kota di Italia menggelar survei untuk referendum. Meskipun tuntutan referendum tersebut bukan pertama kalinya, namun tindakan tersebut mengejutkan pemerintah Italia ditengah krisis ekonomi dan politik yang melanda Italia. Negara Italia tercatat memiliki utang publik tertinggi kedua setelah Yunani sebagai dampak krisis ekonomi global kawasan Eropa pada tahun 2010. Permasalahan ekonomi Negara Italia ini semakin diperburuk oleh krisis politik yang melanda dalam pemerintahan negara ini. Dalam periode tahun 2010-2014 Italia telah mengalami empat kali pergantian perdana menteri, hal ini terjadi karena pemerintahan dianggap gagal dalam mengatasi permasalahan yang melanda Italia. Tuntutan referendum Venesia didasari atas kekecewaan warga kota Venesia terhadap pemerintahan Italia atas krisis ekonomi yang melanda Roma begitu lama, tuntutan referendum ini juga dipicu oleh ketidakpuasan yang dirasakan warga Venesia terhadap pemerintahan Italia yang dianggap tidak efisien dan korup dalam pajak, serta adanya krisis politik yang terjadi dalam pemerintahan. Tuntutan referendum ini dilakukan secara online tanpa pengakuan resmi dari pemerintah pusat Italia karena tidak ada hukum yang mengikat. Presiden Napolitano menunjuk walikota Florence yaitu Matteo Renzi menjadi perdana menteri baru untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi maupun reformasi politik pemerintah Italia.

Penelitian ini membahas bagaimana langkah – langkah kebijakan pemerintah Italia dalam merespon tuntutan referendum Venesia. Penelitian ini menggunakan teori sistem politik dalam proses pengambilan kebijakan dari David Easton dan konsep referendum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif

Hasil dari penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah Italia dalam merespon tuntutan referendum Venesia dengan mengeluarkan kebijakan politik dan kebijakan ekonomi. Adapun kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Italia yaitu, mengesahkan undang - undang (UU no.56/2014) yang bertujuan untuk meningkatkan status kota Venesia setara dengan sepuluh kota terbesar di negara Italia itu yang dikenal dengan nama "Kota Metropolitan" (*Citra Metropolitane*). Pemerintah Italia juga mereformasi birokrasi politik Italia serta melakukan reformasi sistem tenaga kerja dan pajak. Pemerintah Italia juga mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk menstabilkan kondisi ekonomi ditengah krisis ekonomi yang melanda Italia. Pemerintah Italia mencanangkan program lapangan kerja, memotong beban pada pengusaha bertujuan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan pekerja tambahan serta untuk meningkatkan investasi dan program aktif untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan untuk menarik modal asing melalui penyederhanaan hubungan antara perusahaan dan berbagai institusi publik. Pemerintah melakukan penghematan anggaran, menurunkan tingkat suku bunga yang rendah dan memungkinkan pemerintah mendapat kredit baru tanpa menyebabkan defisit anggaran terlalu besar. Adapun kebijakan federalisme fiskal pemerintah Italia terhadap Venesia sebagai bentuk desentralisasi administratif yang sederhana bagi daerah untuk mengelola dan mengatur sumber daya daerah. Pemerintahan Italia juga mengeluarkan kebijakan otonomi daerah bagi Venesia serta dukungan dari dunia Internasional terhadap pemerintah Italia membatalkan tuntutan referendum Venesia dengan membentuk komisi pengamat Internasional.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Politik Pemerintah Italia Membatalkan Tuntutan Referendum Venesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember; Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Agung Purwanto, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
3. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak, Ibu, Dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang memberi ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah;
6. Romla Dwi Indah Permatasari, S.Sos terima kasih atas segala dukungan, semangat dan waktu yang diberikan demi membantuku dalam segala hal.
7. Teman - teman seperjuangan HI angkatan 2008; M. Niamurrohman, M. Lalu Ahdiyati, dan lainnya terima kasih atas dukungan serta sukses untuk kalian semua;
8. Teman-teman seperjuangan HMI Komisariat Fisipol terima kasih atas dukungan serta sukses buat kalian semua;
9. Sahabat-sahabatku dari SMAN 1 Situbondo terima kasih atas dukungannya serta sukses buat kalian semua;
10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan sesuatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 30 Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.2.1 Batasan Materi.....	5
1.2.2 Batasan Waktu.....	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kerangka Konseptual.....	6
1.5.1 Teori Sistem Politik Dalam Proses Pengambilan Kebijakan	7
1.5.2 Konsep Referendum	11
1.6 Argumen Utama.....	17
1.7 Metode Penelitian	18
1.7.1 Tehnik Pengumpulan Data	18
1.7.2 Tehnik Analisis Data	19
1.8 Sistematika Penulisan.....	19

BAB 2. PROFIL NEGARA DAN POLITIK PEMERINTAHAN	
ITALIA	21
2.1 Profil Negara Italia	21
2.1.1 Sejarah Singkat Negara Italia	23
2.1.2 Penduduk Italia	24
2.1.3 Sistem Pemerintahan Italia	26
2.1.4 Sistem Hukum Pemerintahan Italia	28
2.1.5 Ekonomi Italia	29
2.2 Gambaran Umum Venesia.....	31
2.2.1 Sejarah Bergabungnya Venesia Ke Italia	33
2.2.2 Politik Pemerintahan kota Venesia.....	34
2.2.3 Penduduk Venesia	35
2.2.4 Ekonomi Venesia.....	37
BAB 3. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA	
TUNTUTAN REFERENDUM VENESIA.....	39
3.1 Gejolak Munculnya Gerakan Referendum Venesia	39
3.2 Dampak Krisis Ekonomi Italia Yang Semakin Besar	45
3.3 Krisis Politik Pemerintahan Italia Akibat Seringnya	
Pergantian Perdana Menteri	52
3.4 Faktor Sejarah Yang Mendorong Gerakan Referendum	
Venesia.....	55
BAB 4. KEBIJAKAN PEMERINTAH ITALIA DALAM	
MERESPON TUNTUTAN REFERENDUM VENESIA	58
4.1 Kebijakan Politik Pemerintah Italia.....	58
4.2 Kebijakan Ekonomi Pemerintah Italia.....	66
4.2.1 Kebijakan Federalisme Fiskal.....	74
4.2.2 Kebijakan Otonomi Khusus Daerah Venesia	76
4.3 Dukungan Dunia Internasional Terhadap Pemerintah Italia	
Membatalkan Tuntutan Referendum Venesia	80

BAB 5. KESIMPULAN	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 3.1 Hasil poling suara menurut media <i>Plesbiculo.eu's</i>	41
2. Tabel 3.2 Indikator Keuangan Publik dalam Persentase dari GDP	50
3. Tabel 4.1 Dataset: Economic Outlook No 96 - November 2014 OECD Annual Projections	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1.1 Kerangka Sistem Politik Dalam Proses Pengambilan kebijakan.....	10
2. Gambar 2.1 Peta Italia.....	22
3. Gambar 2.2 Populasi pada Periode 1861-2011. Populasi penduduk	25
4. Gambar 2.3 Peta Venesia	32
5. Gambar 2.4 Populasi Penduduk Venesia 1961-2011	36
6. Gambar 3.1 Partisipasi warga Venesia dalam Referendum Venesia	42
7. Gambar 3.2 Poling Suara warga Venesia.....	43
8. Gambar 3.3 GDP Italia tahun 2012.....	45
9. Gambar 3.4 Grafik Kinerja Utang Publik Italia terhadap PDB Setelah 1960-2012.....	46
10. Gambar 4.1 PDB Pemerintah Italia Tahun 2014	67
11. Gambar 4.2 Data pertumbuhan ekonomi Italia menurut OECD.....	73

DAFTAR SINGKATAN

GDP	= Gross Domestic Product
PM	= Perdana Menteri
PDB	= Produk Domestik Bruto
UU	= Undang-Undang
MEE	= Masyarakat Ekonomi Eropa
NATO	= North Atlantic Treaty Organization
M5S	= Movement Five Star
CGIL	= Confederazione Generale Italiana del Lavoro
CSIL	= Confederazione Italiana del Sindacati Lavoratori
UIL	= Unione Italiana del Lavoro
PD	= Partai Demokrat
KUH	= Kitab Undang Hukum
PPP	= Pajak Pendapatan Pemerintah
OECD	= Organizatin for Economic Co-operation and Development
USD	= United States Dollar
UKM	= Usaha Kecil Menengah
RUU	= Rancangan Undang - Undang
CNEE	= <i>Council National Economy and Employment</i>
PBB	= Perserikatan Bangsa - bangsa
UNE	= Union North East
NCD	= New Centre Right
KPI	= Komisi Pengamat Internasional

UE	= Uni Eropa
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
PaTreVe	= Padua Treviso Venisia
TPS	= Tempat Pemilihan Suara
IMF	= International Monetary Fund
PPN	= Pajak Pertambahan Nilai

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Italia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan parlementer di Eropa Selatan.¹ Italia termasuk dalam empat besar negara di kawasan Eropa dengan pendapatan per kapita tertinggi.² Menurut data Bank dunia dan *Organizatin for Economic Co-operation and Development* (OECD), Italia merupakan salah satu negara maju dengan angka GDP sebesar 2.055 triliun US\$ pada tahun 2010, yang terdiri dari sektor jasa 72,8%, industri 25,3% dan sektor pertanian 1,9%.³ Namun, kondisi ini tidak dapat bertahan lama, Setelah kawasan Eropa mengalami krisis ekonomi global tahun 2010, Italia tercatat memiliki utang publik tertinggi kedua setelah Yunani. Menurut badan statistik Uni Eropa (Eurostat), pada tahun 2010 negara Italia memiliki utang sebesar yaitu 126,8% dari GDP Italia.⁴

Krisis tersebut semakin diperburuk dengan permasalahan politik yang terjadi di pemerintahan Italia, Perdana Menteri Silvio Berlusconi dipecat oleh senat Italia setelah dijatuhi hukuman empat tahun penjara atas tuduhan penggelapan pajak.⁵ Mario Monti kemudian dilantik menggantikan Silvio Berlusconi sebagai perdana menteri Italia pada tahun 2011, setelah dua tahun menjabat sebagai perdana Menteri pada tahun 2013 Mario Monti mengundurkan diri dua hari setelah partai mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi menarik dukungannya terhadap pemerintahan.⁶

¹ Steve Herrmann. 2012. *“Italy Country Profile”*. Diakses dari: http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/europe/country_profiles/1065345.stm. [20 Agustus 2014]

² *Ibid*

³ World Bank National Accounts data and OECD National Accounts data files. 2014. *“GNI per Capita”*. Diakses dari: <http://www.indexmundi.com/facts/italy/gni-per-capita>. [15 September 2014]

⁴ *Ibid*

⁵ DW. 2014. *“Berlusconi Dikeluarkan dari Senat Italia”*. Diakses dari: <http://www.dw.de/berlusconi-dikeluarkan-dari-senat-italia/a-17259016>. [27 Maret 2014]

⁶ Joe. 2013. *“Monti Segera Mundur”*. Diakses dari: <http://tekno.kompas.com/read/2012/12/10/02352267/monti.segera.mundur>. [02 April 2014]

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakstabilan politik pada rentang waktu 2010-2013. Permasalahan politik ternyata tidak hanya berhenti pada pengunduran diri Perdana Mario Monti. Presiden Giorgio Napolitano menunjuk politisi kiri Enrico Letta menjadi perdana menteri baru Italia, tanggal 14 Februari 2014 Perdana Menteri Italia Enrico Letta juga mengundurkan diri setelah ia mendapatkan kritikan keras dari para pesaing politiknya. Dengan demikian Perdana Menteri Enrico Letta hanya menjabat satu tahun dalam masa jabatannya.⁷ Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 Matteo Renzi dilantik menjadi perdana menteri baru setelah Enrico Letta gagal melakukan reformasi di negara yang dililit korupsi dan birokrasi ini. Pelantikan Matteo Renzi ini dilakukan ditengah keraguan bahwa pemerintahan baru memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah negeri itu.⁸

Ketidakstabilan ekonomi dan politik ini menambah daftar panjang permasalahan Italia ditengah krisis ekonomi global Uni Eropa, berdasarkan data dari International Money Found (IMF) tahun 2010 mengungkapkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Uni Eropa sebesar US\$ 16,282 Trilliun (setara 12,279 Trilliun Euro), sedangkan pajak pendapatan pemerintah (PPP) Uni Eropa sebesar US\$ 15,170 Trilliun (setara 12,500 Trilliun Euro), dan tingkat pertumbuhan PDB 1,8% per tahun.⁹ Sementara itu kesenjangan standar kehidupan antara Italia bagian utara dan bagian selatan yang cukup signifikan. Rata-rata PDB perkapita di Italia bagian utara jauh melebihi rata-rata Uni Eropa yaitu sebesar US\$ 17,125 Trilliun, sedangkan banyak region di Italia Selatan berada jauh di bawah rata-rata Uni Eropa yaitu sebesar US\$ 15,325 Trilliun.¹⁰

⁷ Sulaiman. 2014. "*Krisis Politik, PM Italia Mengundur Diri*". Diakses dari: <http://lampost.co/berita/krisis-politik-pm-italia-mengundur-diri>. [27 Maret 2014]

⁸ Ervan Hardoko. 2014. "*Matteo Renzi Resmi Menjadi Perdana Menteri Termuda Italia*". Diakses dari: <Http://Internasional.Kompas.Com/Read/2014/02/23/0125394/Matteo.Renzi.Resmi.Menjadi.Perdana.Menteri.Termuda.Italia>. [02 April 2014]

⁹ IMF. 2010. "*IMF Executive Board Concludes 2010 Article IV Consultation with Italy*". Diakses dari <http://dokumen.tips/documents/uni-eropa-55c8057d24793.html>. [04 April 2014]

¹⁰ The Economist. 2014. "*In need of reform*" diakses dari: <http://www.economist.com/node/21556297>. [03 April 2014]

Kondisi tersebut memicu terjadinya gerakan separatis yang dilakukan oleh warga kota Venesia pada tanggal 17 Maret 2014 yang menggelar pemungutan suara untuk melepaskan diri dari Italia dan mendirikan negara sendiri sebagai Republik Venesia.¹¹ Venesia sebagai kawasan yang makmur menyumbangkan sebagian besar pajak untuk pemerintah Italia. Kawasan Venesia dan sekitarnya membayar pajak sebesar 71 miliar euro untuk pemerintah pusat Italia lebih tinggi dibandingkan dari yang mereka peroleh dari investasi dan jasa.¹² Federico Caner, pemimpin kelompok separatis kanan Lega Nord mengatakan bahwa Venesia membayar lebih dari 20 miliar euro kepada pemerintah pusat Italia di Roma. Sementara apa yang diberikan dari pemerintah pusat Italia masih jauh dibandingkan apa yang telah Venesia berikan untuk pemerintah Italia.¹³ Upaya referendum merupakan salah satu usaha warga Venesia untuk mengembalikan sejarah 1.000 tahun dimana Venesia merupakan negara republik yang berdaulat.

Referendum ini juga dipicu oleh kekecewaan masyarakat atas krisis ekonomi yang melanda Roma, serta ketidakpuasan yang dirasakan warga Venesia terhadap pemerintahan Italia yang menganggap pemerintah pusat tidak efisien dan korup terhadap pembayaran pajak.¹⁴ Aktivis dan partai politik lokal yang disebut sebagai *Republic of Veneto* menggelar survei jajak pendapat sebagai upaya pengesahan referendum. Lebih dari dua juta penduduk atau sekitar 73 persen warga mengikuti jajak pendapat survei yang dilakukan secara *online*.¹⁵ Hasil jajak pendapat survei tersebut diumumkan pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 dari Treviso, sebuah

¹¹ Ervan Hardoko. 2014. "Venesia Ingin Melepaskan Diri dari Italia" diakses dari: <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/17/2331136/Venesia.Ingin.Melepaskan.Diri.dari.Italia>. [26 Maret 2014]

¹² *Ibid*

¹³ Lesthia Kertopati. 2014. "Besok, Venesia Putuskan Pisah atau Tetap Masuk Italia". Diakses dari: <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/488872-besok--venesia-putuskan-pisah-atau-tetap-masuk-italia>. [26 Maret 2014]

¹⁴ Nick Squires. 2014. "Venice prepares for referendum on secession from Italy". Diakses dari: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/10698299/Venice-prepares-for-referendum-on-secession-from-Italy.html>. [28 Maret 2014]

¹⁵ Pandasurya Wijaya. 2014. "Venesia pilih pisah dari Italia". Diakses dari: <http://www.merdeka.com/dunia/venesia-pilih-pisah-dari-italia.html>. [02 April 2014]

kota di wilayah Venesia sebagai penyelenggara referendum. Hasil dari survei jajak pendapat tersebut mengungkapkan sebanyak 2.102.969 atau 89 persen dari semua kertas suara mendukung kemerdekaan. Sementara itu sebanyak 257.266 orang menolak referendum. Kemenangan besar ini mengejutkan para pihak yang menolak referendum. Hal ini disebabkan sebelum survei jajak pendapat hanya sekitar 65 persen pemilih di wilayah ini mendukung kemerdekaan itu. Ternyata hasilnya adalah 89 persen pemilih mendukung referendum kemerdekaan Venesia.¹⁶

Kemenangan survei jajak pendapat ini ternyata tidak sah karena survei ini dianggap ilegal dan tidak diakui keabsahannya oleh pemerintah pusat di Roma bahkan oleh dunia internasional. Mengetahui hal tersebut, Gubernur Venesia, Luca Zaia berjanji untuk mengadakan referendum kedua. Referendum kedua ini rencananya akan digelar oleh pemerintah daerah Venesia. Hal ini untuk menekan tindakan pemerintah pusat di Roma yang mengeluarkan kebijakan penolakan hasil survei jajak pendapat yang pertama.¹⁷ Perdana Menteri Matteo Renzi kemudian berjanji mencanangkan program kebijakan - kebijakan baru untuk mengagalkan tuntutan referendum dan memenuhi permintaan warga Venesia untuk meredakan situasi panas karena aksi demonstrasi yang muncul setelah penolakan referendum tersebut.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik melakukan analisis lebih dalam permasalahan dan menuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul:

“KEBIJAKAN PEMERINTAH ITALIA DALAM MERESPON TUNTUTAN REFERENDUM VENESIA”

¹⁶ Matt Ford. 2014. *“Europe’s Latest Secession Movement: Venice?”*. Diakses dari: <http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/03/europes-latest-secession-movement-venice/284562/>. [28 Maret 2014]

¹⁷ Aningtias Jatmika. 2014. *”89 Persen Warga Venesia Ingin Merdeka”*. Diakses dari: <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/24/117564851/89-Persen-Warga-Venesia-Ingin-Merdeka>. [01 April 2014]

¹⁸ Kirstin Hausen. 2014. *”Matteo Renzi Canangkan Reformasi di Italia”*. Diakses dari: <http://www.dw.de/matteo-renzi-canangkan-reformasi-di-italia/a-17455976>. [01 April 2014]

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian karya ilmiah perlu sekali adanya pembatasan-pembatasan masalah yang menjadi inti atau pokok bahasan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menghindari kekaburan arti dari masalah yang dibahas dan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, yang akan mengakibatkan berkurangnya bobot ilmiah suatu penulisan. Selain itu, ruang lingkup pembahasan juga akan mempermudah peneliti dalam penganalisaan kejadian-kejadian pada kurun waktu tertentu. Kartini Kartono mengungkapkan bahwa:

“Pembatasan masalah sangat berkaitan dengan adanya limit peringkasan sempitnya waktu, terbatasnya tenaga dan kemampuan intelektual guna menyelidiki interelasi persoalan”.¹⁹

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam proposal penelitian ini terdiri atas batasan materi dan batasan waktu, yaitu sebagai berikut;

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi diperlukan agar masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian lebih fokus dan tidak melebar pada masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang dianalisis. Dalam penelitian ini penulis akan membatasi pembahasan mengenai pada kebijakan pemerintahan Italia dalam merespon tuntutan referendum Venesia yang ingin melepaskan diri dari pemerintahan Italia yaitu pada tahun 2014 dimana pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri Matteo Renzi.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penelitian ini dimulai pada munculnya tuntutan referendum yang dilakukan warga Venesia pada awal tahun 2014 hingga keluarnya

¹⁹ Kartini Kartono. 1990. *“Metodologi Riset”*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hal. 63

kebijakan pemerintah Italia dalam merespon tuntutan referendum Venesia di masa kepemimpinan perdana menteri Matteo Renzi tahun 2014.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan hal mendasar yang harus disusun oleh setiap peneliti, perumusan masalah akan membantu untuk memberikan pencarian fokus pembahasan. Dengan mengetahui suatu permasalahan dengan jelas, maka hal tersebut membantu penulis untuk berkonsentrasi dan fokus pada pembahasan tentang persoalan apa yang sebenarnya ingin diketahui dari topik yang telah dipilih. Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, **Bagaimana Langkah - langkah Kebijakan Pemerintah Italia Dalam Merespon Tuntutan Referendum Venesia?**

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari deskripsi sementara. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan..²⁰ Berdasarkan pengertian di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan pemerintah Italia dalam merespon tuntutan referendum Venesia yang ingin melepaskan diri dari pemerintahan negara Italia pada tahun 2014 masa kepemimpinan perdana menteri Matteo Renzi.

1.5 Kerangka Konseptual

Pada prinsipnya, konsepsi dasar atau kerangka berpikir dalam penelitian ilmiah merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau pegangan. Untuk menjelaskan dan menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam memecahkan masalah penelitian, maka diperlukan teori-teori. Teori adalah

²⁰ Dulkhalim,dkk. 2012. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember". Jember: Jember University Press. Hal. 20

serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Teori yang baik adalah teori yang bisa didukung atau ditolak melalui analisa yang jelas dan penggunaan data secara sistemik. Agar bisa didukung atau ditolak, teori harus memuat konsep-konsep yang jelas.²¹ Sedangkan konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial. Konsep secara sederhana adalah memberikan nama pada kelas tertentu dari objek, kegiatan, kualitas atau gejala. Konsep mungkin secara sistematis ditentukan oleh berbagai macam jenis dan untuk berbagai macam tujuan pula.²² Melalui konsep penelitian ini, diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan dengan lainnya. Untuk menganalisa dan meneliti hal-hal yang terjadi dalam kebijakan politik Italia terkait dengan referendum Venesia maka penulis menggunakan satu teori dan satu konsep dalam menulis penelitian ini, yaitu:

- (1) Teori Sistem Politik Dalam Proses Pengambilan Kebijakan;
- (2) Konsep Referendum

1.5.1 Teori Sistem Politik Dalam Proses Pengambilan Kebijakan

Teori sistem politik dalam proses pengambilan kebijakan dari tokoh David Easton. Menurut David Easton dalam artikel “*Political Science*” dalam *International Encyclopedia Of The Social Sciences* mengungkapkan:

“The description of political science as the study of the making of public policy has become so widespread , particularly in American political science , and has become so much a part of the normal and even unstated intellectual apparatus of most students politics, that its elaboration as a major concept can no longer be associated with any single person or group (Deskripsi ilmu politik sebagai studi tentang

²¹ Mochtar Mas’oed. 1990. “*Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*”. Yogyakarta:Hal.187

²² Frans Bona Sihombing. 1984. “*Ilmu Politik Internasional,(Teori, Konsep, dan Sistem)*”. Ghalia Indonesia:Hal.75

pembuatan kebijakan publik telah menjadi begitu luas, terutama dalam ilmu politik Amerika dan telah menjadi begitu banyak bagian dari aparat intelektual yang normal dan bahkan tak tertulis dari sebagian besar siswa politik bahwa elaborasi sebagai konsep utama tidak bisa lagi berhubungan dengan orang atau kelompok)".²³

Pendapat Easton di atas menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah termasuk dalam unsur-unsur pokok politik. Kebijakan pemerintah tersebut terwujud dibawah pengaruh beranekaragam kekuatan dan tidak hanya mencakup badan-badan pemerintah seperti dewan menteri, departemen dan parlemen, tetapi juga partai-partai politik, media komunikasi, kelompok-kelompok penekan, dan aksi-aksi hektra parlementer. Dengan keadaan yang demikian maka unsur politik tidak hanya mencakup kepada kebijakan pemerintah melainkan juga meliputi badan-badan di dalam pemerintah, di luar pemerintah seperti media dan juga konflik. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan analisa gejala-gejala politik dan gejala lainnya.²⁴

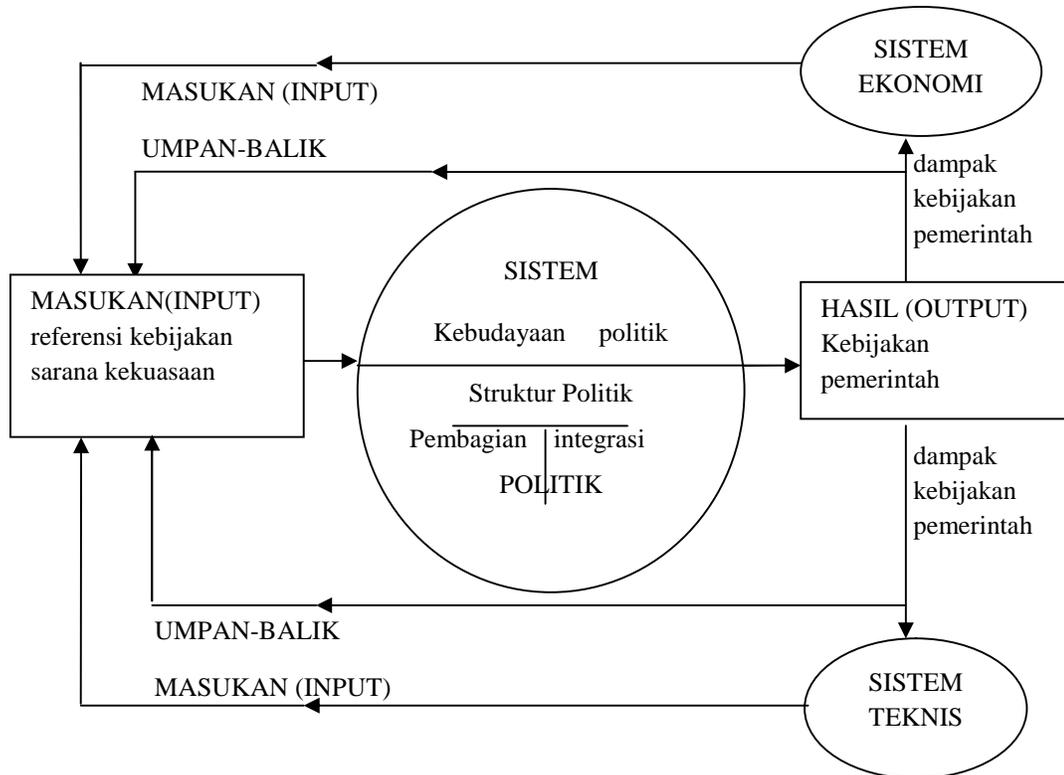
Lebih lanjut, Easton dan Almond mengungkapkan keterkaitan kebijakan pemerintah dengan sistem politik. Pengertian sistem politik adalah keseluruhan pendirian, kelakuan dan kedudukan bertujuan untuk mempengaruhi isi, terjadinya, dan dampak dari kebijakan pemerintah. Sistem politik merupakan suatu sistem terbuka dan saling menyesuaikan, artinya keterkaitan sistem saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Pada sistem politik terdapat masukan (*input*) dari lingkungan sebagai bentuk referensi kebijakan. Sebaliknya terdapat penyaluran (*output*) dari sistem politik ke lingkungannya. *Output* terpenting dari sistem politik adalah kebijakan pemerintah. Pada sistem politik juga terjadi pergantian (*conversion*) dari masukan menjadi kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh suatu sistem politik tersebut tentu saja mempunyai berbagai dampak (*out come*) terhadap lingkungan. Dampak tersebut juga dapat berpengaruh terhadap sistem politik yang menjadi asal datangnya kebijakan

²³ *Ibid*

²⁴ David Easton. 1965. "An Approach To The Analysis Of Political Systems". Cambridge; Cambridge University Press. Hal. 25

itu (*feed back*). Dapat ditambahkan bahwa salah satu tujuan dan dampak dari suatu kebijakan pemerintah merupakan perwujudan dari tuntutan masyarakat. Penjabaran di atas penulis gambarkan selengkapnya pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Sistem Politik Dalam Proses Pengambilan Kebijakan
Sumber: A.Hoogerwef. 1985. "*Politikologi*". Jakarta; PT. Erlangga. Hal. 75

Hubungan-hubungan antara kebijakan dan politik dapat disimpulkan sebagai berikut. Tiga bagian terpenting dari politik adalah:

- (1) Kebijakan pemerintah (*Government Policy*),
- (2) Proses kebijakan. Proses kebijakan yaitu keseluruhan dari tindakan-tindakan yang berhubungan dengan persiapan, penentuan, pelaksanaan, penilaian dan pengendalian kebijakan (pemerintah).

(3) Dampak kebijakan (*Effects, Impacts, Outcomes of Public Policy*).²⁵

Terdapat kebijakan yang dibentuk orang-orang dan kelompok-kelompok lain di luar pemerintah dikategorikan masih termasuk dalam politik (jadi menjadi obyek penelitian) sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Kebijakan tersebut secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi kebijakan pemerintah, dengan kata lain menjadi bagian dari proses politik, dan
- (2) Sebaliknya pemerintah serta proses politik secara langsung juga mencoba mempengaruhi kebijakan ini.

Pengambilan keputusan oleh seorang pembuat keputusan di mulai dari proses pemilahan sejumlah masalah, menentukan alternatif untuk menciptakan keputusan-keputusan demi kelangsungan hidup bangsa dimasa yang akan datang. Sementara itu terdapat beberapa tahap dalam pengambilan keputusan yaitu:²⁶

- 1) Identifikasi keputusan-keputusan yang akan dibuat
- 2) Pengumpulan informasi yang relevan terkait opsi keputusan
- 3) Identifikasi adanya alternatif keputusan
- 4) Pertimbangan atas bukti-bukti berkaitan dengan informasi berkaitan keputusan
- 5) Pemilihan diantara alternatif keputusan
- 6) Pengambilan tindakan
- 7) Ulasan keputusan dan konsekuensi

Dalam permasalahan skripsi ini, pemerintah Italia selaku pembuat keputusan dihadapkan pada situasi untuk membuat suatu kebijakan terkait adanya tuntutan referendum Venesia. Sebagai perdana menteri baru, Matteo Renzi dihadapkan pada permasalahan Italia terkait dengan tuntutan referendum Venesia. Sementara itu tuntutan referendum ini muncul sebagai *input* kepada pemerintah Italia terhadap kebijakan Italia yang dianggap kurang menguntungkan Venesia. Permasalahan

²⁵ Easton, David. 1985. *Analisa Sistem Politik*. Dalam Mohtar Mas'oe'd dan Collin Mc Andrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 85

²⁶ University of Massachusetts Dartmouth. 2014. "*Decision-making process*". Diakses dari: <http://www.umassd.edu/fycm/decisionmaking/process/> [05 April 2014]

referendum ini sangat berkaitan erat dengan krisis ekonomi dan politik yang melanda Italia. Matteo Renzi sendiri selaku perdana menteri yang baru, memiliki keinginan untuk tercapainya kestabilan dalam pemerintahan yang baru. Langkah pertama Matteo Renzi untuk mewujudkan hal itu adalah dengan meredam aksi demonstrasi yang dilakukan warga Venesia. Langkah konkret yang kemudian diambil adalah dengan melakukan pendekatan politik dan ekonomi kepada warga Venesia. Langkah pendekatan ini ternyata tidak hanya untuk meredam aksi demonstrasi tetapi juga ditujukan untuk menggagalkan tuntutan referendum Venesia. Hal ini dilakukan demi terwujudnya kestabilan Negara.

1.5.2 Konsep Referendum

Referendum merupakan penyerahan suatu masalah kepada orang banyak. Referendum adalah penyerahan masalah pada masyarakat di suatu wilayah supaya mereka dapat menentukan kebijakan terkait dirinya (jadi tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen).²⁷ Penyerahan persoalan dan pengambilan keputusan dalam referendum berbentuk pemungutan suara. Hal ini dilakukan oleh semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat yang berkaitan dengan persoalan yang berusaha diselesaikan tersebut.²⁸ Ada pula pendapat dari Wendy Underhill yang menyatakan mengenai definisi referendum;

"Referendum" is a general term which refers to a measure that appears on the ballot. There are two primary types of referenda: the legislative referendum, whereby the Legislature refers a measure to the voters for their approval, and the popular referendum, a measure that appears on the ballot as a result of a voter petition drive. The popular referendum is similar to the initiative in that both are triggered by petitions, but there are important differences ("Referendum" adalah istilah umum yang mengacu pada

²⁷ Dendy Sugono. 2008. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Diakses dari: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. [01 September 2014]

²⁸ Institute for International Law and Human Rights. 2014. "A COMPARATIVE LOOK AT REFERENDUM LAWS". Diakses dari: <http://lawandhumanrights.org/documents/complookreferendumlaw.pdf>. [01 September 2014]

ukuran yang muncul pada surat suara. Ada dua jenis utama dari referendum: referendum legislatif, dimana Legislatif mengacu ukuran untuk pemilih untuk persetujuan mereka, dan referendum, ukuran yang muncul pada pemungutan suara sebagai hasil dari petisi pemilih drive. Populer referendum mirip dengan inisiatif dalam yang keduanya dipicu oleh petisi, tetapi ada perbedaan penting).²⁹

Referendum merupakan istilah yang mengacu pada munculnya surat suara. Terdapat dua jenis referendum yakni referendum legislatif dan umum. Referendum legislatif dilakukan apabila suatu amendemen konstitusi atau undang-undang baru dari pemerintah yang mewajibkan adanya persetujuan seluruh rakyat. Sementara itu pengertian referendum umum merupakan pengambilan suara yang diselenggarakan oleh rakyat dan berdasarkan kemauan rakyat. Referendum oleh rakyat ini biasanya diawali oleh sebuah aksi demonstrasi atau petisi yang berhasil mengumpulkan dukungan mayoritas.

Berkaitan dengan referendum umum, inisiatif warga merupakan sarana yang semakin penting dalam hal memberlakukan undang-undang atau juga upaya mencegah terbitnya suatu undang-undang. Referendum ini telah terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa referendum oleh rakyat berbeda dengan referendum dalam pengertian pengambilan suara yang dilakukan oleh pemerintah. Referendum dalam sistem politik negara Italia sendiri memiliki dua jenis, yaitu:

- 1) Referendum yang berdasar pada hukum konstitusional Italia yang berisi pemungutan suara tentang penggabungan daerah (*merger*) atau pembentukan daerah baru di Negara Italia (Pasal 132 ayat 2 UU Dasar Italia);
- 2) Referendum yang berdasar pada hukum biasa, dalam hal pemungutan suara yang dilakukan memungkinkan provinsi atau kota untuk melepaskan diri dari daerah dan bergabung dengan wilayah lain (Pasal 132 ayat 2 UU Dasar Italia).

²⁹ Wendy Underhill. 2014. "*Initiative, Referendum And Recall*". Diakses dari: <http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/initiative-referendum-and-recall-overview.aspx>. [01 September 2014]

Berdasarkan pada keputusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Italia, referendum diatur dalam Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Dasar Italia. Selain itu, referendum diatur juga dalam persetujuan UU No. 352/1970 yang berisi aturan penggunaan referendum sebagai hasil dari kegiatan yang terkait dengan pergerakan opini publik untuk pembentukan undang-undang mengenai masalah pemisahan. Sementara itu menurut Pasal 8, referendum juga diatur dalam hubungannya dengan otoritas lokal, baik provinsi atau wilayah di bawah pemerintah pusat. Biasanya administrasi berkaitan dengan referendum telah ditulis dalam undang-undang dan prinsip-prinsip umum berkaitan dengan pelaksanaan semua aspek referendum yang lebih praktis.³⁰

Pemberian otoritas referendum terhadap pemerintah lokal tersebut ditunjukkan dengan diberikannya kewenangan terhadap dewan regional. Lima dewan regional atau 500.000 ribu pemilih dapat meminta referendum yang bertujuan membatalkan seluruhnya atau sebagian dari persetujuan hukum biasa. Referendum ini dibuat untuk menentukan keputusan hukum antara setuju atau tidak setuju. Referendum biasanya digunakan dalam kasus berkaitan hukum pajak, anggaran, langkah - langkah amnesti dan pengampunan, serta tindakan ratifikasi perjanjian internasional.³¹ Referendum yang dilakukan oleh kota didasarkan pada undang-undang No.352/1970 yang mengungkapkan referendum merupakan upaya penggabungan wilayah atau antar daerah misalnya, referendum ini harus disetujui oleh dewan kota yang mewakili dan paling sedikit 1/3 dari penduduk daerah yang bersangkutan dan diselenggarakan di wilayah daerah yang bersangkutan. Apabila mayoritas suara menyetujui untuk melakukan referendum, maka referendum yang dilakukan sah secara hukum. Sedangkan Referendum untuk pemisahan satu atau lebih baik provinsi atau kota untuk membentuk daerah baru, maka referendum tersebut harus disetujui oleh dewan daerah yang mewakili 1/3 dari penduduk wilayah yang meminta referendum. apabila

³⁰ Gianfranco Pasquino. 2002. "*Sistem Politik Italia*". Bononia; Bononia University Press. Hal. 192

³¹ Alessandro Buralli. 2014. "*Pemerintah Daerah konsolidasi*". Diakses dari: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=1091>. [03 September 2014]

referendum ini disetujui dan sah secara hukum, hal ini dapat berdampak pada perubahan undang-undang daerah masing-masing.

Referendum biasanya dilakukan kampanye. Terdapat faktor jangka panjang dan jangka pendek yang mempengaruhi keberhasilan kampanye dan juga referendum. Ideologi adalah faktor yang menjadi bagian penting dalam pemilihan nasional. Sementara itu dampak jangka pendek dari strategi dan taktik kampanye ini dapat membuat perbedaan besar dalam menentukan hasil referendum.³² Dinamika kampanye sendiri dilakukan bervariasi, tergantung pada isu referendum. Le Duc mengidentifikasi tiga jenis kampanye referendum sebagai berikut:³³

- 1) Dimana pemilih tidak diharapkan membentuk opini yang objektif tentang isu. Opini yang tidak diinginkan ini biasanya terbentuk sebagai hasil dari kampanye yang sedang berlangsung,
- 2) Kampanye pembalikan opini. Opini ini cukup bermasalah dan terkenal karena mengambil arah baru selama kampanye,
- 3) Kampanye perjuangan berat di mana opini jauh lebih kencang dan kurang tunduk pada perubahan yang cepat atau pembalikan fakta yang tiba-tiba (*sudden reversal*).

Dalam kampanye pemilihan umum biasa, pemilih biasanya telah memiliki pendirian akan suatu pilihan. Hal ini biasanya karena telah ada keberpihakan, ideologi, dan penerimaan argumen yang dibentuk oleh para pemimpin politik yang kredibel. Hal ini berbeda dengan pemilihan dalam referendum, Dalam ketiga jenis kampanye referendum, apabila masyarakat tidak diberi penjelasan mengenai elit yang pada dasarnya terbagi dalam dua kelompok (pro-kontra), Hal ini dapat meningkatkan ambiguitas (ketidakjelasan) pemahaman pemilihan. Selain itu, dalam kampanye referendum sikap warga seringkali tampak agak tidak stabil, hal ini

³² Holli A. Semetko. 2004. "Political Campaigning In Referendums Framing The Referendum Issue". USA and Canada; Routledge. Hal. 78

³³ *Ibid*

disebabkan karena informasi baru biasanya datang melalui media massa dan mempengaruhi pemilih.³⁴

Mengingat karakteristik dari kampanye referendum ialah pemilih yang tidak stabil berdampak pada munculnya kompleksitas masalah. Kampanye referendum kadang lebih penting daripada dalam situasi pemilu yang lain. Sementara itu permasalahan lain yang mungkin ada adalah pemilih dalam referendum yang diyakini yaitu apa motif sebenarnya mereka. Hal ini berbeda dengan pemilihan umum, dimana pemilih dipandu oleh ideologi, keberpihakan, dan tradisi.³⁵ Efek hukum referendum adalah penentuan hasil referendum yang akan mengikat pemerintah. Referendum yang baik adalah yang mengikat secara hukum atau merupakan referendum yang murni konsultatif.³⁶ Jika referendum ini mengikat secara hukum, pemerintah dipaksa untuk menerapkan usulan. Jika referendum adalah bersifat konsultatif, hasil referendum hanya berfungsi sebagai saran kepada pemerintah. Berkaitan dengan hasil referendum konsultatif, dalam pemerintah yang demokratis, sulit bagi untuk mengabaikan hasil referendum meskipun mungkin hanya konsultatif.

Lebih lanjut, referendum dapat dibedakan menjadi referendum legal (resmi) dan ilegal (tidak resmi). Penjabaran mengenai ciri referendum legal dan ilegal dijelaskan dibawah ini:

- a) Referendum yang legal (resmi) dilakukan sesuai amandemen konstitusi atau undang-undang, sedangkan referendum yang ilegal (tidak resmi) dilakukan berdasarkan kemauan rakyat,
- b) Hasil referendum legal mempunyai efek hukum yang mengikat pemerintah sedangkan hasil referendum ilegal tidak ada efek hukum mengikat pemerintah,
- c) Referendum legal sikap pemilih stabil, memiliki dasar yang kuat berdasarkan keberpihakan, ideologi, dan menerima argumen oleh para pemimpin politik

³⁴ Dalton R. J. 2002. *"Citizen Politics. Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies"*. New York: Chatham House. Hal. 115

³⁵ Dalton R. J. 2000. *"The decline of party identification. In R. Dalton and M. Wattenberg (eds), Parties Without Citizens"*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 106

³⁶ Institute for International Law and Human Rights. *Loc.Cit*

yang kredibel, sedangkan referendum ilegal biasanya memiliki sikap pemilih tidak stabil, ketidakpastian dalam isyarat elit.

- d) Referendum legal pemilih diyakini rasional dan jelas motif dari tuntutan, sedangkan referendum ilegal pemilih tidak rasional dan sering tidak jelas apa sebenarnya motif mereka.

Undang-undang tentang referendum dari parlemen Italia juga mensyaratkan seperangkat prinsip-prinsip untuk melaksanakan referendum.³⁷

- 1) Pengajuan pada pendaftaran Pengadilan Kasasi. Semua lembar berkas yang berisi tanda tangan dan sertifikat penjamin pemilu harus dilakukan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal cap pos pengiriman” (Art. 28);
- 2) Tidak bisa mengajukan permintaan referendum pada tahun sebelum berakhirnya salah satu dari dua lembaga. Dalam enam bulan setelah tanggal pertemuan pertemuan pemilu untuk pemilihan salah satu lembaga sendiri”;
- 3) Tuntutan referendum harus diajukan setiap tahun hanya dari tanggal 1 Januari - 30 September”;
- 4) Referendum dikenakan pemeriksaan legitimasi ganda: pertama adanya pengajuan tanda tangan dari Kantor Pusat untuk referendum di Mahkamah Agung. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi harus memutuskan apakah permintaan diadakannya referendum diatur atau tidak dalam hukum undang-undang”;
- 5) Referendum hanya dapat terjadi pada hari Minggu antara 15 April dan 15 Juni;
- 6) Jika referendum tidak merujuk pada hukum yang berlaku maka referendum akan dicabut.

Referendum juga diatur oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

³⁷ Augusto Barbera dan Andrea Morrone. 2003. *Republik referendum, Il Mulino*. Diakses dari: [http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_\(ordinamento_costituzionale_italiano\)](http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_(ordinamento_costituzionale_italiano)). [04 September 2014]

- (1) Tanda tangan warga yang mendukung referendum harus dikumpulkan dalam waktu tiga bulan. Aplikasi harus diajukan selama enam bulan setelah tanggal kebijakan pemilu;
- (2) Dalam kasus pemilihan awal, referendum tersebut ditunda. Referendum dapat dilaksanakan selama dua bulan;
- (3) Referendum dinyatakan valid dan berlaku jika kedua kondisi berikut dipenuhi;
 - a) Konsultasi yang melibatkan mayoritas warga pemilih (kuorum); jumlah suara yang mendukung melebihi jumlah suara melawan. Dalam hal ini, aplikasinya dapat dilakukan oleh lima anggota dewan daerah atau 500.000 ribu pemilih dalam waktu tiga bulan dari penerbitan keputusan dalam berita resmi.
 - b) Adanya hukum konstitusi yang diserahkan kepada referendum. Jika mayoritas pendukung referendum dinyatakan langsung sebagai suara sah, tidak perlu untuk mencapai kuorum pada jumlah pemilih.

Tuntutan referendum yang dilakukan oleh warga Venesia di Italia pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 hingga Jum'at tanggal 21 Maret 2014 yang dilaksanakan secara online dan didukung oleh partai-partai independen di wilayah itu, ternyata tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Karena pemerintahan Roma tidak mengakui hasil survei jajak pendapat yang dilakukan oleh warga Venesia karena dinilai tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak adanya pengakuan dari dunia internasional. Pemerintah Italia mengambil langkah-langkah kebijakan politik dan kebijakan ekonomi untuk membatalkan tuntutan referendum Venesia.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama dalam proses penelitian dan penulisan karya ilmiah, peneliti merumuskan argumen utama sebagai berikut: Langkah-langkah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Italia dalam merespon tuntutan referendum Venesia adalah dengan menggunakan pendekatan politik dan pendekatan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan kembali keadaan politik pemerintahan Italia.

1.7 Metode Penelitian

Agar dapat memperoleh data yang menunjang validitas suatu penelitian maka perlu ada metode penelitian sehingga tujuan penelitian yaitu kebenaran obyektifitas dan ilmiah dapat diperoleh. Metode adalah suatu prosedur atau cara-cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.³⁸ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah;

- (1) Teknik pengumpulan data
- (2) Teknik analisis data

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data utama yang dikumpulkan dari data sekunder dengan menggunakan studi dokumentasi dan kepustakaan. Dokumentasi yang dimaksud adalah berupa sumber-sumber informasi atau data yang relevan dengan referendum Venesia dan kebijakan politik pemerintahan Italia. Dokumen yang dimaksud antara lain dapat berupa laporan atau berita mengenai proses dan hasil referendum Venesia serta keputusan politik atau peraturan perundang-undangan politik Italia.

Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah sumber referensi literatur atau pustaka yang terkait dengan referendum Venesia maupun kebijakan politik pemerintahan Italia. Berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut, pengumpulan data antara lain ditelusuri sumber-sumbernya dari:

- 1) Perpustakaan pusat Universitas Jember
- 2) Perpustakaan FISIP Universitas Jember
- 3) Buku pribadi
- 4) Situs-situs internet.

³⁸ Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *“Metode Penelitian Sosial”*. Jakarta, Bumi Aksara. Hal. 57

1.7.2 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian bertujuan untuk menginformasikan dan membimbing penyelidikan sebuah penelitian sebuah kasus menjadi jelas. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Data merupakan data sekunder yang relevan dengan referendum Venesia dan kebijakan politik pemerintahan Italia yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisa kasus yang terjadi tersebut menjadi jelas. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh merupakan data sekunder yang tidak dapat diukur secara langsung serta digunakan untuk menganalisa secara lebih mendalam terhadap fenomena yang terjadi.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui susunan secara umum dari karya tulis ini peneliti akan menjabarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori/ kerangka konseptual, hipotesis/ argumen utama, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Profil Negara dan Politik Pemerintahan Italia

Bab ini peneliti akan membahas mengenai penguraian tentang penjelasan umum profil negara, struktur, politik pemerintahan dan sistem hukum negara Italia.

Bab 3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Referendum Venesia.

Bab ini berisi tentang uraian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tuntutan referendum Venesia yang dilakukan oleh warga Venesia terhadap pemerintah Italia sehingga memudahkan analisis yang akan dilakukan pada bab berikutnya.

Bab 4 Kebijakan Pemerintah Italia Dalam Merespon Tuntutan Referendum Venesia

Bab ini penulis akan membahas mengenai kebijakan politik dan kebijakan ekonomi pemerintah Italia dalam merespon tuntutan referendum Venesia.

Bab 5 Kesimpulan

Bab ini akan memuat kesimpulan yang diambil oleh penulis dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan sekaligus merupakan penutup dari serangkaian tulisan ini.

BAB 2

PROFIL NEGARA DAN POLITIK PEMERINTAHAN ITALIA

2.1 Profil Negara Italia

Negara Italia adalah salah satu negara tertua di Eropa yang beribukota di Roma selama berabad-abad yang menjadi pusat politik dan keagamaan barat, yakni sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi dan situs tahta suci. Secara geografis negara Italia terletak di bagian selatan benua Eropa. Italia merupakan semenanjung yang luasnya mencapai Laut Mediterania pusat di bagian timur laut dari Tunisia.³⁹ Italia terletak antara 35°LU dan 47°LU, dan 6°BT dan 19°BT. Negara Italia dengan luas wilayah 301.338 km² (termasuk Pulau Sisilia 25.707 km² dan Pulau Sardinia 24.089 km², tetapi tidak termasuk negara kecil San Marino dan Vatikan), 294.020 km² yaitu daratan dan 7.210 km² sisanya adalah perairan. Negara Italia memiliki total garis pantai, dan perbatasan sepanjang 7.600 km; yaitu di Laut Adriatik, Laut Ionia, Laut Tirenia (740 km), dan perbatasan dengan negara Perancis (488 km), Negara Austria (430 km), Negara Slovenia (232 km), dan Negara Swiss (740 km), serta San Marino (39 km), dan Vatikan (3,2 km), kedua-duanya merupakan enclave, sedangkan iklim di Italia dipengaruhi oleh iklim sedang.

Batas-batas negara Italia sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Perancis, Swiss, Austria, dan Slovenia;
- 2) Sebelah selatan : Laut Ionia;
- 3) Sebelah timur : Laut Adriatik;
- 4) Sebelah barat : Laut Tyrhenia.

Kawasan pesisir negara ini berhadapan dengan Laut Liguria, Laut Tirenia, Laut Ionia, dan Laut Adriatik yang semuanya berhubungan langsung dengan Laut Tengah. Secara geografis negara Italia sebagian besar wilayah merupakan gunung-gunung

³⁹ Mapnall. 2014. "Peta - Italia (*Repubblica Italiana*)". Diakses dari: http://www.mapnall.com/id/Peta-Italia_780116.html. [26 November 2014]

dengan dataran sempit.⁴⁰ Hal tersebut dapat dilihat pada gambar peta Italia dibawah ini:



Gambar 2.1 Peta Italia

Sumber: Planet Ware. 2015. "Italy - Republic Map". Diakses dari: <http://www.planetware.com/map/italy-italy-republic-map-i-137.htm>. [05 Januari 2015]

⁴⁰ Ottimi Siti. 2006. "Profile of Italy". Diakses dari: <http://www.understandingitaly.com/profile.html>. [25 November 2014]

2.1.1 Sejarah Singkat Negara Italia

Italia merupakan sebuah negara paling tua di dunia, dan memiliki banyak peninggalan-peninggalan sejarah purba. Roma adalah ibu kota Italia yang digunakan sebagai tempat pusat politik dan pusat keagamaan katolik, serta sebagai ibu kota pada masa kekaisaran romawi dan situs tahta suci. Setelah jatuhnya kekaisaran romawi, kekaisaran ini akhirnya pecah menjadi dua bagian pada abad 395 sebelum masehi yaitu kekaisaran romawi barat, dan kekaisaran romawi timur.⁴¹ Kaisar terakhir romawi barat digulingkan oleh pemimpin bangsa Barbar, Odoaker. Setelah runtuhnya Roma, Italia ditaklukkan oleh suku Jermanik (Ostrogoth), tetapi pada abad ke-6 Kaisar Romawi Timur/Bizantium (Yustinianus) menaklukkannya. Italia menjadi sebuah negara pada tahun 1861 ketika negara-negara bagian (*regional states*) bersama dengan wilayah Sardinia dan Sisilia yang dipersatukan oleh Raja Victor Emanuel II. Setelah kekalahan Perang Dunia II negara Italia bersama sekutunya Jerman. Italia menjadi republik setelah suksesnya referendum konstitusi yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juni tahun 1946, yang dirayakan sebagai Hari Republik. Hari itu juga menjadi kali pertama perempuan Italia diizinkan untuk menyalurkan suaranya.⁴² Negara Italia membangun pemeritahan dengan sistem demokrasi menggantikan sistem kerajaan pada tahun 1946, setelah putera dari Raja Viktor Imanuel III, yakni Raja Umberto II dipaksa untuk turun tahta. Konstitusi Republik disahkan pada tanggal 1 Januari 1948 dibawah perjanjian perdamaian paris 1947.

Ekonomi Italia mulai bangkit dan berkembang di tahun 1948. Italia juga merupakan anggota piagam dari NATO dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Hal ini membuktikan bahwa Italia berada di garis depan unifikasi ekonomi dan politik

⁴¹ Sekjen Kemlu Republik Indonesia. 2013. "BUKU PANDUAN KBRI ROMA". Diakses dari: <http://www.kemlu.go.id/rome/id/default.aspx>. [20 November 2014]

⁴² Victoria. 1946. "*Italia 1946: Le Donne al Voto, Dossier a Cura di Mariachiara Fugazza e Silvia Cassamagnaghi*" (PDF). Diakses dari: <http://www.immaculateheartacademy.org/outside2/socialstudies/kuhns/1%20Italy%20Birthplace%20of%20the%20Renaissance.pdf> . [20 Desember 2014]

Eropa, bergabung dengan Uni Ekonomi dan Moneter pada tahun 1999. Perkembangan ini ternyata tidak sesuai dengan kondisi Italia secara keseluruhan, adanya kesejangan ekonomi antara Italia bagian utara yang lebih makmur daripada Italia bagian selatan yang pertumbuhan ekonomi lamban, tingkat pengangguran tinggi, kejahatan, dan korupsi dalam pemerintahan wilayah Italia bagian selatan.⁴³ Italia dibagi menjadi 20 region, lima di antaranya berstatus otonom khusus yang membolehkan mereka memberlakukan legislasi menyangkut beberapa urusan lokal. Negara ini kemudian dibagi lagi menjadi 110 provinsi, dan 8.100 kotamadya. Hanya region Lembah Aosta yang memiliki satu provinsi. Terdapat juga 15 kota metropolitan (*città metropolitane*), didirikan pada tahun 2009, tetapi pembagian wilayah ini masih belum berjalan.⁴⁴

Iklm di Italia sangat beraneka ragam, hal ini dipengaruhi oleh bentuk semenanjung yang besar dan membujur dan sebagian besar wilayahnya bergunung-gunung. Di sebagian besar pedalaman utara dan tengah, iklim merentang dari subtropis basah sampai kontinental basah dan iklim lautan. Secara khusus, iklim di wilayah geografis Lembah Po adalah kontinental dengan musim dingin yang keras dan musim panas yang terik.⁴⁵

2.1.2 Penduduk Italia

Penduduk Italia sebagian besar beragama dan berbahasa sama namun dengan budaya, ekonomi, dan politik yang beragam. Italia memiliki kepadatan penduduk terbesar kelima di Eropa dengan 196 penduduk per kilometer persegi. Dengan populasi sejumlah 60,8 juta jiwa, Italia merupakan negara berpenduduk terbanyak kelima di Eropa, dan terbanyak ke-23 di dunia.⁴⁶ Kelompok minoritas penduduk asli

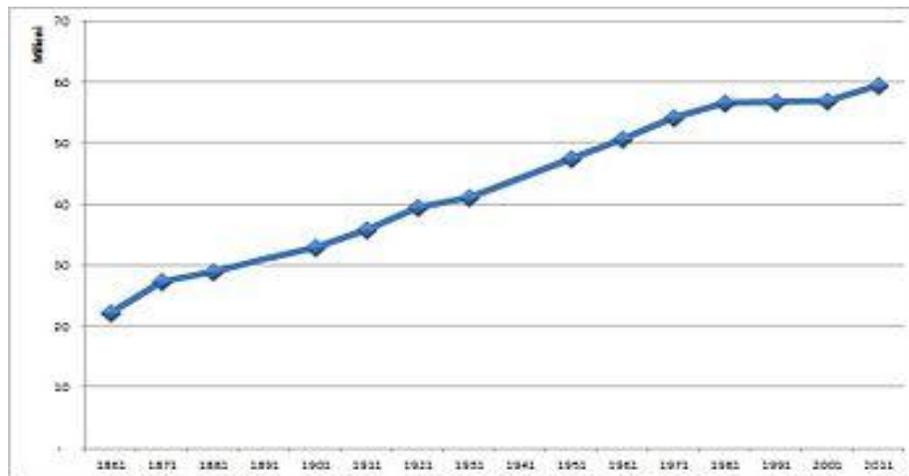
⁴³ Central Intelligence Agency. 2014. "*The World Factbook: Economy Italy*". Diakses dari: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html>. [25 November 2014]

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Adriana Rigutti. 2009. "*Meteorologia*". Giunti. Hal. 95

⁴⁶ *Ibid*

kecil jumlahnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.2 populasi penduduk Italia dibawah berikut ini:



Gambar 2.2 Populasi penduduk Italia

Sumber: Istituto Nazionale di Statistica. 2011. "Resident population on 1st January". Diakses dari: <http://dati.istat.it/Index.aspx?lang=en>. [27 November 2014]

Negara Italia memiliki 60.626.442 penduduk menurut catatan munisipal (*Anagrafe*) pada tanggal 1 Januari 2011.⁴⁷ Kepadatannya bertambah sebesar 201 penduduk per kilometer persegi lebih padat daripada sebagian besar negara-negara di Eropa Barat. Tetapi, penyebaran penduduk tidak begitu merata. Wilayah yang paling padat adalah Lembah Po (mencapai hampir setengah populasi nasional) dan kawasan metropolitan Roma dan Napoli. Sementara wilayah-wilayah yang luas seperti daratan tinggi Alpen dan Apenina, Plato Basilicata dan Pulau Sardinia adalah wilayah yang jarang penduduk. Populasi Italia hampir menjadi dua kali lipat pada abad ke-20, tetapi pola pertumbuhannya sangat tidak seragam karena adanya migrasi besar-besaran dari selatan yang berasal wilayah perdesaan ke utara yang wilayah industri. Suatu gejala yang terjadi sebagai akibat dari keajaiban ekonomi Italia pada dasawarsa 1950-an sampai 1960-an. Selain pada dasawarsa 1980-an Italia telah mengalami imigrasi besar-besaran untuk kali pertama dalam sejarah modern.

⁴⁷ Istituto Nazionale di Statistica. *Loc. Cit*

Menurut pemerintah Italia terdapat 4.570.317 warga asing di Italia pada bulan Januari 2011.⁴⁸

2.1.3 Sistem Pemerintahan Italia

Italia merupakan negara kesatuan dengan bentuk republik yang menganut sistem pemerintahan parlementer di Eropa Selatan. Parlemen Italia merupakan parlemen bikameral sempurna berdasarkan sistem pemungutan suara proporsional yang terdiri dari dua lembaga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (yang berapat di Palazzo Montecitorio) yang beranggotakan 630 orang dan diketuai oleh Laura Boldrini (*Sinistra Ecologia Libertà - SEL*) yang terpilih pada 16 Maret 2013 dan Senat Republik (yang berapat di Palazzo Madama) yang beranggotakan 315 senator dan 3 senator seumur hidup. Ketua Senat sekarang adalah Pietro Grasso (*Partito Democratico*) yang terpilih pada 16 Maret 2013. Kedua lembaga tersebut memiliki kekuatan yang sama dan memiliki masa jabatan selama lima tahun. Perdana Menteri atau Presiden Dewan Menteri (*Presidente del Consiglio dei Ministri*) adalah kepala pemerintahan Italia. Perdana Menteri dan kabinet diangkat oleh Presiden Republik, tetapi harus melalui pemungutan suara kepercayaan di dalam parlemen untuk bisa melaksanakan tugasnya.⁴⁹

Italia dipimpin oleh seorang kepala negara yaitu Presiden Republik (*Presidente della Repubblica*) dengan masa jabatan tujuh tahun yang dipilih melalui pemungutan suara oleh anggota-anggota Senat, dewan perwakilan rakyat dan wakil-wakil dewan wilayah di lima puluh delapan perwakilan daerah. Pemilihannya membutuhkan mayoritas dukungan yang menjamin bahwa presiden terpilih menikmati dukungan dari semua partai politik. Meskipun tidak dilarang oleh hukum, tidak ada presiden yang pernah menjabat dua periode. Biasanya presiden mencoba untuk tetap keluar dari hari ke hari di politik dan menjadi jaminan institusional bagi semua yang terlibat dalam proses politik. Sebagai pengawal konstitusi Italia, Presiden juga dapat menolak

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Sekjen Kemlu Republik Indonesia. *Op.Cit.* Hal: 3-4

undang-undang secara terbuka anti konstitusional dengan menolak untuk menandatangani.⁵⁰

Pada tanggal 20 April 2013 Giorgio Napolitano terpilih untuk kedua kali menjadi Presiden Republik Italia. Hal Ini merupakan pertama kali seorang presiden dipilih kedua kalinya dalam sejarah Italia. Giorgio Napolitano terpilih sebagai presiden pada putaran ke enam dari hasil pemungutan suara pemilihan suara yaitu dengan jumlah suara 738 dari kemungkinan 1.007, sedangkan yang yang dibutuhkan untuk presiden ialah 504 suara yang diperlukan. Presiden republik mengambil alih banyak tugas yang sebelumnya dilakukan oleh monarki. Presiden berfungsi sebagai titik fokus antara tiga cabang kekuasaan: presiden dipilih oleh anggota parlemen, presiden menunjuk eksekutif, dan presiden peradilan. Presiden republik menunjuk dewan menteri dan kepala pemerintahan (*Presidente del Consiglio dei Ministri* - Ketua Dewan Menteri).⁵¹

Kepala pemerintahan Italia yaitu Perdana Menteri (*Presidente del Consiglio dei Ministri* - Ketua Dewan Menteri). Perdana Menteri saat ini Matteo Renzi, perdana menteri disebut sebagai Presiden Dewan Menteri. Perdana menteri Italia memiliki otoritas yang lebih lemah daripada beberapa rekan sejawat. Perdana menteri tidak diberi kekuasaan membubarkan parlemen atau memberhentikan menteri dan harus menerima suara persetujuan dari dewan menteri yang memegang kekuasaan eksekutif efektif untuk menjalankan sebagian besar aktivitas politiknya. Sistem pemungutan suara untuk menentukan kepala pemerintahan Italia didasarkan pada sistem '*Party List*', dimana calon masing-masing pihak adalah peringkat dalam urutan prioritas. Partai atau koalisi yang memenangkan pemilu, diminta untuk membentuk pemerintahan oleh Presiden Republik. Pemerintah harus mendapat dukungan dari kedua lembaga sebelum dapat menjalankan kekuasaan. Jika pemerintah gagal mendapatkan dukungan yang cukup maka harus mengundurkan diri. Jika salah satu

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Ottimi Siti. 2013. "*Italian Politics – Government*". Diakses dari: <http://www.understandingitaly.com/profile-content/government.html>. [03 November 2014]

dari orang-orang pilihan gagal untuk memenangkan dukungan, Parlemen dibubarkan dan pemilu baru diadakan.⁵²

Italia mendesentralisasikan sebagian wewenang pemerintahan pusat kepada tiga tingkatan daerah administratif yaitu: wilayah (*regione*), provinsi (*provincia*) dan kotamadya (*commune*). Italia terdiri dari 20 wilayah termasuk lima wilayah otonomi yaitu Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardenia, Sisilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta dan Veneto.⁵³ Sedangkan partai politik pemerintahan Italia dari partai kanan yaitu Forza Italia yang dipimpin oleh Silvio Berlusconi, partai kiri yaitu Partai Demokrat atau PD yang dipimpin oleh Matteo Renzi, dan Partai-partai moderat yang terdiri dari Civic Pilihan atau SC yang dipimpin oleh Alberto Bombassei beserta koalisi dari beberapa pihak yaitu Lima Bintang Movement atau M5S yang diketuai oleh Beppe Grillo. Sedangkan organisasi masyarakat yaitu meliputi produsen dan pedagang asosiasi (yaitu *Confcommercio*, *Confindustria*), kelompok tani yang terorganisir (yaitu *Confcoltivatori*, *Confagricoltura*), gereja katolik roma tiga konfederasi serikat pekerja utama yaitu *Confederazione Generale Italiana del Lavoro* atau (CGIL) dipimpin Susanna Camusso, yang sayap kiri *Confederazione Italiana del Sindacati Lavoratori* atau (CISL) dipimpin Raffaele Bonanni yang berhaluan Katolik Roma serta *Unione Italiana del Lavoro* atau (UIL) dipimpin Luigi Angeletti yang sentris awam.⁵⁴

2.1.4 Sistem Hukum Pemerintah Italia

Konstitusi negara Italia memakai konstitusi tahun 1848 sebelumnya (awalnya untuk kerajaan Sardinia dan diadopsi oleh kerajaan Italia pada tahun 1861), terbaru berlaku tanggal 22 Desember 1947 kemudian diadopsi tanggal 27 Desember 1947,

⁵² Sulaiman. *Loc.Cit*

⁵³ Sekjen Kemlu Republik Indonesia. *Op.Cit.* Hal. 4

⁵⁴ Central Intelligence Agency. *Loc.Cit*

dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1948 setelah mengalami perubahan berkali-kali dan terakhir pada tahun 2012.⁵⁵ Sedangkan sistem hukum sipil di Italia mengikuti aturan undang-undang dengan peninjauan kembali undang-undang dalam kondisi tertentu di Mahkamah Konstitusi.⁵⁶ Jenis hukum sipil yang paling luas dari sistem hukum di dunia, diterapkan dalam berbagai bentuk di sekitar 150 negara. Hukum sipil tersebut juga disebut sebagai hukum Eropa kontinental (*civil law system*). *Civil law system* yang mengutamakan hukum tertulis disebut juga sistem hukum kodifikasi (*codified law*). Kodifikasi hukum yang berupa *Corpus Juris Civilis* merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang dibentuk tahun 529-534 berdasarkan perintah Kaisar Romawi Timur saat raja Yustinianus I hakim terikat pada hukum tertulis. Kemudian diubah pada putusan pengadilan sebelumnya (Pasal 1917 KUH Perdata). Dalam hukum ini hakim tidak harus terikat, tidak mengenal sistem *Juri*. Hukum tersebut menggunakan metode penalaran deduktif (dari *in abstracto* ke *inkonkreto*). *Adversary system* atau sistem lawan perkara hukum perdata. Mahkamah Agung Kasasi adalah pengadilan tertinggi di pemerintahan Italia, untuk perkara banding pidana maupun perdata. Mahkamah konstitusi Italia (*Corte Costituzionale*) berperan pada penyelarasan undang-undang dengan konstitusi dan merupakan terobosan baru setelah Perang Dunia II.⁵⁷

2.1.5 Ekonomi Negara Italia

Italia memiliki diversifikasi ekonomi industri di bagian wilayah Italia Utara yang didominasi oleh industri dan perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian wilayah Italia selatan didominasi oleh sektor pertanian yang kurang berkembang yang mengakibatkan terdapat banyak pengangguran, kejahatan terorganisasi di Italia dan organisasi kriminal yang menyusupi kehidupan sosial penduduk dan ekonomi di daerah wilayah Italia bagian Selatan. Yang paling parah adalah mafia berasal dari

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

wilayah Sisilia ini meluas ke beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat. Pendapatan mafia mungkin mencapai 9% dari PDB Italia.⁵⁸ Italia juga memiliki ekonomi bawah tanah yang cukup besar diperkirakan menyumbang sebanyak 17% dari PDB. Italia menduduki peringkat 24 negara termaju di dunia dan termasuk dalam 10 besar negara dengan indeks kualitas hidup terbaik di dunia pada tahun 2005.⁵⁹ Hal ini terbukti dengan GDP atau Gross Domestik Produk (PPP atau pajak pendapatan pemerintah) pemerintahan Italia US\$ 1,834 trilyun pada tahun 2012, US\$ 1,822 trilyun pada tahun 2011, US\$ 1,814 trilyun pada tahun 2010, dengan Pertumbuhan GDP -2,4% (2012), 0,4% (2011), 1,8% (2010). Pada tahun 2010 sebagai ekonomi terbesar ke-8 di dunia. Italia adalah negara dengan standar kehidupan yang sangat tinggi, GDP per capita US\$ 30.100 (2012), US\$ 31.000 (2011). Indeks pembangunan manusianya mencapai 0,854, dengan angka harapan hidup sebesar 81,4 per tahun.⁶⁰

Kondisi ini telah menjadikan Italia sebagai anggota kelompok delapan (G-8), kelompok negara-negara industri maju. Selain itu, negara Italia juga termasuk anggota Uni Eropa yang membentuk organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD) serta anggota G-20.⁶¹ Ekonomi Italia di tahun 2012 berkontraksi sebesar -2,4% dan berada pada urutan terbesar ketiga di *Eurozone*, serta ke delapan di dunia. Pajak pendapatan pemerintah Italia tercatat US\$ 1,834 triliun di tahun 2012, turun dari US\$ 1,877 triliun pada tahun 2011. Utang publik telah meningkat terus sejak tahun 2007 melampaui 133% dari PDB pada tahun 2013. Pemerintah masih menghadapi tekanan dari investor dan mitra Eropa untuk mempertahankan stabilitas ekonomi. Sehingga Italia menghadapi hambatan struktural terhadap pertumbuhan seperti inefisiensi pasar tenaga kerja dan penggelapan pajak

⁵⁸ Peter Kiefer. 2007. "*Mafia Crime 7% of GDP In Italy, Group Reports*". Diakses dari: http://www.nytimes.com/2007/10/22/world/europe/22iht-italy.4.8001812.html?_r=0. [27 November 2014]

⁵⁹ Economist Intelligence Unite. 2005. "*The Economist Intelligence Unit' Quality Of Life Index*". Diakses dari: http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf. [03 Desember 2014]

⁶⁰ United Nations Development Programme. 2010. "*Human development report 2010*". United Kingdom. Hlm. 143

⁶¹ *Ibid*

yang meluas. Pada tahun 2013 kondisi pertumbuhan dan pasar tenaga kerja ekonomi memburuk dengan pertumbuhan sebesar -1,8% dan pengangguran meningkat menjadi 12,4%, dengan pengangguran kaum muda sekitar 40%. PDB Italia sekarang 8% di bawah tingkat sebelum krisis tahun 2007. Sumber pendapatan Italia yang berasal dari pariwisata, industri mesin, besi dan baja, pabrik bahan kimia, pengolahan makanan, tekstil, kendaraan bermotor, pakaian, alas kaki, keramik.⁶²

Berdasarkan data lembaga statistik Italia (ISTAT), jumlah perusahaan UKM di Italia sebanyak 3.762.921 atau 99% dari jumlah keseluruhan perusahaan di Italia, yang terbagi ke dalam perusahaan mikro sebanyak 3.557.818, perusahaan kecil sebanyak 186.027, dan perusahaan menengah sebanyak 19.076. Perusahaan UKM menyerap sekitar 81,4% dari total tenaga kerja di Italia yang saat ini diperkirakan mencapai 25,28 juta jiwa. Tenaga kerja Italia sebagian besar bergerak di sektor jasa (67,8%), industri (28,3), dan agrikultur (3,9%). Total nilai perdagangan Italia tahun 2012 mencapai US\$ 982,6 milyar dengan surplus sebesar US\$ 11,07 milyar. Perlu dicatat bahwa selama periode tahun 2009-2011, neraca perdagangan Italia selalu mengalami defisit yaitu US\$ 7,9 milyar (2009), US\$ 38,9 milyar (2010), dan US\$ 37,1 milyar (2011). Kejahatan terorganisir merupakan segmen terbesar dari perekonomian Italia, akuntansi penerimaan untuk 90 miliar Euro melalui berbagai kegiatan pemerasan, riba, selundupan, perampokan, perjudian dan internet, pembajakan. Sindikat kejahatan yang terorganisir ini mencapai tujuh persen dari produk domestik bruto Italia.⁶³

2.2 Gambaran Umum Venesia

Venesia merupakan salah satu wilayah bagian negara Italia yang berpusat di wilayah Italia bagian timur laut. Negara ini berdiri selama satu milenium dari akhir abad ke tujuh hingga tahun 1797. Kota Venesia ini juga dikenal dengan julukan *La Serenissima*. Republik Venesia pada masa kejayaannya adalah kekuatan maritim dan

⁶² Central Intelligence Agency. *Loc.Cit*

⁶³ Peter Kiefer. *Loc.Cit*

perdagangan utama di wilayah Mediterania dapat dilihat pada peta Venesia dibawah:⁶⁴



Gambar 2.3 Peta Venesia

Sumber: Admin Holidaymap. 2014. "Venice on Map of Italy". Diakses dari: <http://holidaymapq.com/venice-on-map-of-italy.html>. [04 Desember 2014]

Kota Venesia sangat terkenal sebagai tempat wisata. Hal ini karena pemandangan kota Venesia yang sangat indah. Kota Venesia juga disebut sebagai kota di atas air. Venesia juga memiliki bangunan-bangunan lama dan bersejarah yang memiliki sisi seni sebagai aset dari pariwisatanya. Para wisatawan yang datang ke Venesia biasanya menikmati pemandangan bangunan kota dari atas perahu yang melaju di sungai-sungai Venesia. Venesia berpenduduk sekitar 270.098 jiwa. Lebih lanjut tentang Venesia akan dijelaskan dalam sub-bab berikut.

⁶⁴ Gienne. 2012. "Storia Di Venezia". Diakses dari: http://www.storiadivenezia.net/sito/index.php?option=com_content&view=article&catid=41%3Aricerca&id=87%3Atesti&Itemid=30.htm. [21 Desember 2014]

2.2.1 Sejarah Bergabungnya Venesia Ke Italia

Venesia dikenal karena kanal dan istana tua besar yang ada disana. Venesia adalah salah satu kota paling indah dan unik di dunia. Kota ini adalah ibukota wilayah Veneto di Italia. Dibangun di laguna, Venesia terletak pada jalur sekitar seratusan pulau kecil yang dihubungkan oleh banyak jembatan Venesia menghadapi arah timur yang memiliki hubungan yang dekat dengan kaisar di Konstantinopel.⁶⁵ Venesia berkembang sebagai sebuah republik yang dipimpin oleh seorang duke (*Doge*). Armadanya yang kuat membuat Venesia menjadi "Ratu Adriatik". Venesia memainkan peran yang dominan dalam perdagangan maritim di Mediterania Timur.⁶⁶ Sampai abad kesebelas kekuatan Duke meningkat, tetapi melemah sampai ia menjadi satu-satunya pejabat yang diatur oleh oligarki pedagang. Oligarki menjalankan kekuasaan melalui Dewan Besar dan Dewan Kecil. Dewan kecil adalah penasihat permanen. *The Great Council* yang memiliki lebih dua ribu anggota pendukung untuk memiliki kursi kedaulatan. Hal tersebut merupakan kekuasaan tertinggi dari badan-badan pemerintah lainnya yang dibentuk. Salah satunya adalah Senat, yang pada abad keempat belas adalah pusat administrasi publik, bertugas menangani bisnis sehari-hari pemerintah. Abad keempat belas Venesia telah memperoleh kontrol atas wilayah di daratan Italia sekitar 1380 daerah. Abad kelima belas Venesia dianggap sebagai ancaman besar bagi perdamaian dan kebebasan Italia. Pada tahun 1500 Venesia menguasai daerah di Italia Utara dan kota-kota penting sebelumnya independen menjadi berada di bawah kekuasaannya, termasuk Padua, Verona, dan banyak lainnya. Kemudian negara Italia telah ditundukkan oleh kekuatan Spanyol, Venesia tetap independen.⁶⁷

⁶⁵ Pete. 2014. "*Profil Lengkap Negara Italia*". Diakses dari: <http://www.kembangpete.com/2014/08/27/profil-lengkap-negara-italia/>. [22 Oktober 2014]

⁶⁶ H.J. Hübner. 2012. "*Republic Of Venice*". Diakses dari: <http://www.zum.de/whkmla/region/italy/xvenice.html>. [25 Oktober 2014]

⁶⁷ Piero della Francesca. 2014. "*Chapter 3 The Italian City-States of The Renaissance*". Diakses dari: http://vlib.iue.it/carrie/texts/carrie_books/gilbert/03.html. [10 November 2014]

Republik Venesia kehilangan kemerdekaannya ketika Raja Napoleon Bonaparte menaklukan Venesia pada tahun 1791. Venesia berada dibawah kekuasaan Raja Napoleon Bonaparte, kemudian kekalahan Raja Napoleon Bonaparte yang mengakibatkan wilayah kekuasaan dikembalikan kemerdekaannya. Pada tahun 1866 Venesia masih berada dalam kekuasaan Austria yang kemudian bergabung bersama kerajaan Italia karena aneksasi penggabungan wilayah sisa dari kerajaan Lombardy-Venetia (termasuk saat Veneto, Friuli dan provinsi Mantua).⁶⁸ Venesia bergabung karena adanya keinginan undang-undang daerah Otonom dari pemerintah Italia. Namun pemberian undang-undang daerah otonom bagi Venesia dibatalkan oleh dekrit pemerintah Italia.⁶⁹

2.2.2 Politik Pemerintahan kota Venesia

Presiden wilayah ini Luca Zaia , terpilih untuk masa jabatan pertama 30 Maret 2010. Markas besar karya dewan kota di Palazzo Balbi dan di Grand Canal Venesia. Pemerintahan Venesia terdiri dari Badan legislatif kotamadya yaitu Dewan Kota (*Consiglio Comunale*), yang terdiri dari 45 anggota dewan yang terpilih setiap lima tahun dengan sistem proporsional, kontekstual dengan pemilihan walikota. Badan eksekutif adalah komite kota (*Giunta Comunale*) yang disusun oleh 12 penilai yang dicalonkan presiden alih oleh walikota dipilih secara langsung rakyat. Walikota Venesia saat ini adalah Giorgio Orsoni, pengacara sayap kiri memimpin aliansi progresif terdiri dari Demokrat, Ekologi Kiri Freedom, Partai Hijau dan Federasi Kiri. Politik dan struktural Venesia dibagi menjadi enam distrik (San Marco, Castello, San Polo, Cannaregio, Santa Croce dan Dorsoduro) dan diatur sama

⁶⁸ Alessio Antonini. 2011. "Abrogata per errore dal governo l'annessione del Veneto all'Italia". Diakses dari: <http://corriereedelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2011/8-febbraio-2011/abrogata-errore-governo-l-annessione-veneto-all-italia-181421237045.shtml>. [27 Maret 2014]

⁶⁹ Matt Ford. *Loc.Cit*

seperti semua kota-kota lain di Italia dengan walikota dan hakim. Venesia masih pusat ekonomi dan budaya provinsi.⁷⁰

Setiap distrik diatur oleh *Council (Consiglio)* dan Presiden yang dipilih secara kontekstual dengan Walikota kota. Organisasi perkotaan diatur oleh Konstitusi Italia (UU Dasar Italia pasal 114). Wilayah distrik memiliki kekuatan untuk memberikan saran kepada walikota dengan pendapat mengikat pada masalah-masalah besar menyangkut (lingkungan, konstruksi, kesehatan masyarakat, pasar lokal) dan melaksanakan fungsi didelegasikan oleh dewan kota, Dari enam distrik tersebut lima wilayah distrik diatur oleh Partai Demokrat dan satu oleh oposisi⁷¹

2.2.3 Penduduk Venesia

Populasi penduduk Venesia yang tidak merata dengan kepadatan penduduk tertinggi di sepanjang jalur langsung dari Verona ke Venesia melalui Vicenza, Padua dan Treviso, dan akibatnya di wilayah Veronese jumlah penduduk menetap rendah. Bahkan kurang dihuni oleh orang-orang di kaki Alpine dan gunung kecuali Vicentino tinggi (dengan Schio, Thiene, Bassano del Grappa) dan Valbelluna. Pada tahun 2009 jumlah penduduk sekitar 270.098 jiwa yang tinggal di Provinsi Venesia (perkiraan populasi 272.000 jiwa termasuk penduduk dari seluruh daerah Venesia, sekitar 60.000 di kota bersejarah *Venice* (Centro storico), 176.000 di Terraferma (Daratan), terutama di frazioni besar Mestre dan Marghera; 31.000 tinggal di pulau-pulau lainnya di laguna). Bersama dengan Padua dan Treviso, kota ini termasuk dalam Padua - Treviso - *Venice Metropolitan Area* (Patreve) dengan jumlah penduduk 1.600.000. Patreve hanya daerah metropolitan statistik tanpa tingkat otonomi.⁷²

Kondisi signifikan kerja dan kehidupan yang lebih baik di daratan telah menyebabkan migrasi besar-besaran dalam 60 tahun terakhir. Orang muda khususnya

⁷⁰ MP Pedani. 2014. "*Venezia Ed i Suoi Abitanti*". Diakses dari: <http://www.zainoo.com/it/guida-italia/veneto/visitare-venezia/economia-veneziana>. [15 November 2014]

⁷¹ *Ibid*

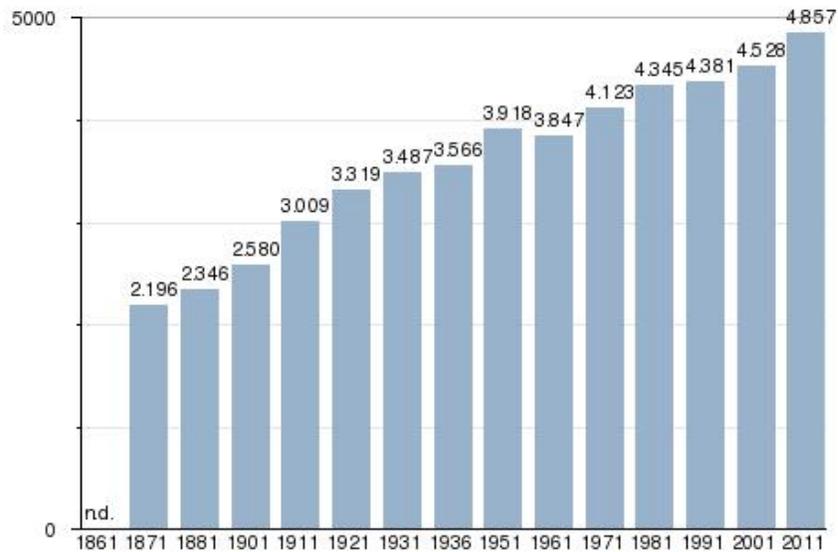
⁷² Admin tumblr. 2014. "*Venice*". Diakses dari: <http://veneciatimur.tumblr.com/>. [14 november 2014]

cenderung bergerak keluar dari kota laguna. Jumlah penduduk yang tinggal di Venesia menjadi kurang dari tahun ke tahun dan kota ini semakin didominasi oleh hotel, restoran, toko-toko dan, tentu saja, wisatawan. Kota laguna terancam, nasib museum kota yang tanpa kehidupan nyata karena sekitar delapan puluhan penduduk menyebar di seluruh Italia bagian utara, depopulasi kota-kota besar mendukung kota-kota kecil. Hal ini telah menyebabkan pembangunan kota yang cukup besar dan beberapa telah mengamati pembentukan megalopolis yang luas membentang terutama antara Padua, Mestre dan Treviso (yang disebut PaTreVe atau Segitiga Veneto).⁷³ Penduduk Venesia yang tersebar di wilayah distrik Venesia meliputi:⁷⁴

- (1) Venesia (kota bersejarah)-Murano-Burano (juga dikenal sebagai Venezia Insulare) dengan jumlah penduduk 69.136;
- (2) Lido-Pellestrina (juga dikenal sebagai Venezia Litorale) dengan jumlah penduduk 21.664, Daratan (Terraferma) yang dianeksasi oleh dekret kerajaan pada tahun 1926 dengan provinsi Venezia;
- (3) Favaro Veneto dengan jumlah penduduk 23.615;
- (4) Mestre Carpenedo (juga dikenal sebagai *Mestre Centro*) jumlah penduduk 88.952;
- (5) Chirignago-Zelarino jumlah penduduk 38.179;
- (6) Marghera jumlah penduduk 28.466

⁷³ Corriere della Sera. 2004. “Veneto in L’Enciclopedia Geografica - vol. 1”. Milan. Roma

⁷⁴ *Ibid*



fonte ISTAT - elaborazione grafica a cura di Wikipedia

Gambar 2.4 Populasi Penduduk Venesia 1961-2011

Sumber: ISTAT. 2011. "Veneto". Diakses dari: <http://www.istat.it/it/veneto>. [30 November 2014]

2.2.4 Ekonomi Venesia

Ekonomi Venesia telah berubah sepanjang sejarah. Venesia pada abad pertengahan dan *Renaissance* (Renaissance) adalah pusat utama untuk perdagangan. Pada saat itu dikendalikan kerajaan yang dikelilingi laut yang luas sehingga menjadi kota Eropa sangat kaya, pemimpin dalam urusan politik dan ekonomi dan pusat perdagangan dan perdagangan.⁷⁵ Pariwisata di daerah Venesia merupakan pilar ekonomi Venesia. 14 juta wisatawan berlibur setiap tahun kota Venesia menjadikan kota paling banyak dikunjungi di Italia setelah Roma. Namun demikian, hanya sekitar empat juta pengunjung bermalam di kota. Sekitar 10 juta pengunjung hanya mengunjungi Piazza San Marco dan Basilika tidak bermalam di kota tersebut. Pariwisata di Venesia didorong oleh seni dan kerajinan yang berkembang di Venesia, Burano, Murano dan pulau-pulau sekitarnya dan Souvenir tersedia di semua tingkat

⁷⁵ *Ibid*

harga dan kualitas. Selain dari sektor pariwisata juga industri berat mendominasi ekonomi Venesia. Di pedalaman Venesia tepatnya di Marghera terdapat industri kimia terbesar serta pembangkit listrik terbesar dan deposit terbesar minyak mentah di Italia. Hal ini merupakan faktor ekonomi yang penting di kota Venesia sebagai sumber lapangan pekerjaan bagi penduduk Venesia.⁷⁶

⁷⁶ MP Pedani. *Loc.Cit*

BAB 3
FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
TUNTUTAN REFERENDUM VENESIA

3.1 Gejolak Munculnya Gerakan Referendum Venesia

Tuntutan referendum Venesia yang dilakukan pada tahun 2014 bukanlah yang pertama kali dilakukan. Sebelum Venesia bergabung dengan Italia, Venesia pernah melakukan Referendum pada bulan Oktober tahun 1866. Pada saat Venesia masih berada dalam kekuasaan Austria. Tuntutan referendum Venesia mencapai puncaknya ketika pada tahun 2014, Venesia kembali menyerukan untuk menjadi negara berdaulat sendiri dalam Referendum kemerdekaan dari pemerintahan Italia. Dalam survei jajak pendapat yang dilakukan warga kota Venesia sebanyak delapan puluh sembilan persen dari penduduk kota laguna dan sekitarnya, memilih untuk melepaskan diri dari pemerintah Italia dalam pemungutan suara yang tidak resmi. Survei jajak pendapat ini diikuti oleh sekitar lima juta penduduk wilayah Veneto juga mencakup wilayah bagian Lombardy, Trentino dan Friuli-Venezia Giulia. Sekitar 2,1 juta warga Venesia atau 89 persen pemilih berpartisipasi untuk merdeka. Tuntutan referendum kali ini dipelopori oleh sebuah kelompok organisasi yang menamakan Plebiscito.eu, juga mewakili koalisi kelompok nasionalis Venetist untuk memprotes pemerintahan Roma.⁷⁸

Protes warga Venesia untuk jajak pendapat ini dilakukan secara online setiap kotamadya Venesia selama sepekan, pada tanggal 16 Maret 2014 sampai 21 Maret 2014 tanpa pengakuan resmi dari pemerintah pusat Italia. Pemimpin penyelenggara jajak pendapat yaitu Gianluca Busato merupakan seorang pengusaha software juga aktivis Venetist yang memiliki perusahaan jasa konsultasi digital. Awal bulan Maret, para pemimpin gerakan kemerdekaan mengatakan tidak akan menanti persetujuan dari pemerintahan Roma dan bertekad akan memulai proses pemisahan, jika seluruh

⁷⁸ Matt Ford. *Loc.Cit*

warga Venesia mendukung gerakan ini.⁷⁹ Tuntutan referendum Venesia ini dipicu oleh kekecewaan warga daerah Venesia yang merasa diabaikan dan dasingkan dari pemerintah pusat Italia. Venesia salah satu daerah yang paling makmur di negara Italia, hanya menerima lima miliar euro dari pelayanan pemerintah, sedangkan setiap tahunnya wilayah Venesia membayar pajak sebesar tujuh miliar euro kepada pemerintah pusat, dengan sisanya dialokasikan untuk daerah di bagian selatan Italia yang miskin oleh pemerintah Roma. Mereka berasumsi kemerdekaan bisa memberikan wilayah Venesia sebanyak 20 miliar Euro pendapatan surplus, menurut penyelenggara jajak pendapat. Venesia merupakan daerah ekonomi terkuat diantara daerah negara-negara Eropa lainnya, setidaknya pada basis kota metropolitan yang mampu mengolah daerah sendiri. Menurut ketua separatis partai *Indipendenza Veneta*, Lodovico Pizzati mengatakan:⁸⁰

“Sebuah negara merdeka Venesia dapat masuk peringkat ketujuh dalam PDB per kapita antara negara-negara Eropa karena alasan utamanya adalah ekonomi. Kami berada dalam situasi yang lebih buruk karena tarif pajak di Italia adalah yang tertinggi dunia dan layanan kami sangat miskin. Kami memiliki 20 miliar euro yang hilang dari pendapatan daerah setiap tahun dan itu tak tertahankan”.

Secara historis tuntutan referendum Venesia didorong oleh gerakan aktivis kemerdekaan wilayah Venesia yang sudah lama menjadi bagian dari negara Italia selama 146 tahun.⁸¹ Menurut salah satu staf surat kabar *Plebiscito.eu's*, sebanyak 2.360.000 warga Venesia dari keseluruhan warga Venesia lima juta penduduk memilih ikut berpartisipasi dalam jajak pendapat secara online. Hasil survei ini sangat mengejutkan sebanyak 89,10% menyatakan setuju dengan kemerdekaan daerah sendiri (sebanyak 2.102.969 orang memilih setuju atas kemerdekaan Veneto dan

⁷⁹ Admin Berita 4. 2014. “Warga Provinsi Veneto Italia, Dukung Kemerdekaan Venesia”. Diakses dari: <http://www.beritaempat.com/internasional/warga-provinsi-veneto-italia-dukung-kemerdekaan-venesia/>. [28 april 2014]

⁸⁰ Funny King. 2014. “Veneto Libero, Indipendente (nella Nato in Europa e con l’Euro.... Il Problema è lo STATO ITALIANO)”. Diakses dari: <http://www.rischiocalcolato.it/2014/03/veneto-libero-indipendente-nato-in-europa-leuro-problema-italiano.html>. [18 Februari 2015]

⁸¹ Matt Ford. *Loc.Cit*

sebesar 56.6% tersebut suara berasal warga Venesia) dan 10,90% menyatakan tidak setuju dengan kemerdekaan (257.266 orang tidak setuju dengan kemerdekaan).⁸² Selain itu, pemilih juga diminta untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang tiga "isu-isu kebijakan luar negeri". Upaya daerah Veneto untuk menjadi mandiri adopsi mata uang Euro (di dukung oleh 51,73% suara pemilih), menjadi keanggotaan Uni Eropa (didukung oleh 55,7% suara pemilih) dan menjadi keanggotaan NATO (didukung oleh 64,5% suara pemilih). Hal ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1 Hasil poling suara menurut media *Plesbiculo.eu's*

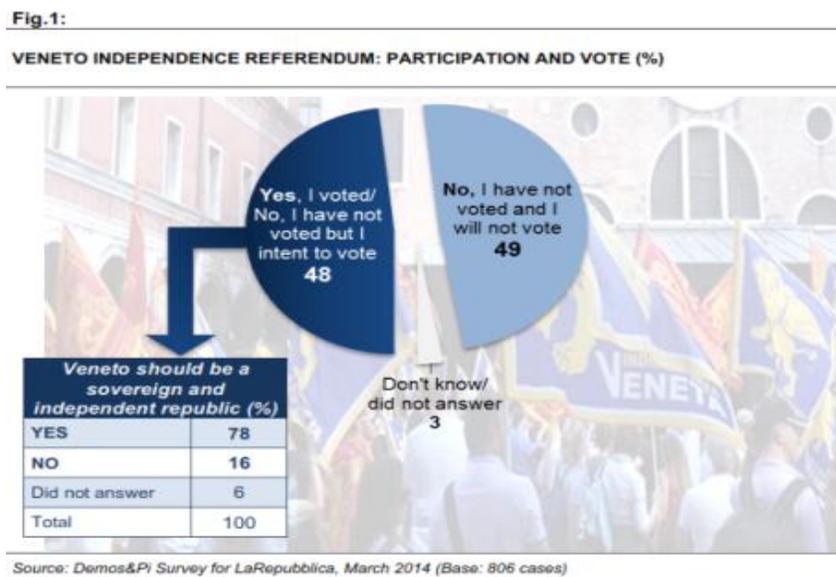
Pertanyaan	Jumlah Pemilih	% Pemilih mempunyai hak suara	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)
Veneto menjadi Republik Federal atau negara Independen?	2.360.235	63.23%	2.102.969 (89.10%)	257.266 (10.90%)
Referendum menjadi keanggotaan UNI EROPA	833.550	22.33%	464.534 (55.73%)	369.016 (44.27%)
Referendum untuk adopsi mata uang Euro	919.598	24.63%	472.409 (51.73%)	447.189 (48.63%)
Referendum untuk menjadi keanggotaan NATO	740.431	19.84%	477.312 (64.46%)	263.119 (35.53%)

Sumber: Funny King. *Loc.Cit*

Adapun hasil jajak pendapat sebagai tuntutan referendum menurut staf *Plesbiculo.eu* itu juga terpilih sepuluh calon pemimpin sebagai "delegasi kemerdekaan" terpilih: Gianluca Busato adalah calon pertama terbanyak yang dipilih dengan 135.306 orang untuk pemimpin, diikuti oleh Stefano Vescovi (48.320), Selena Veronese (46.947), Silvia Gandin (43.025), Lodovico Pizzati (25.731),

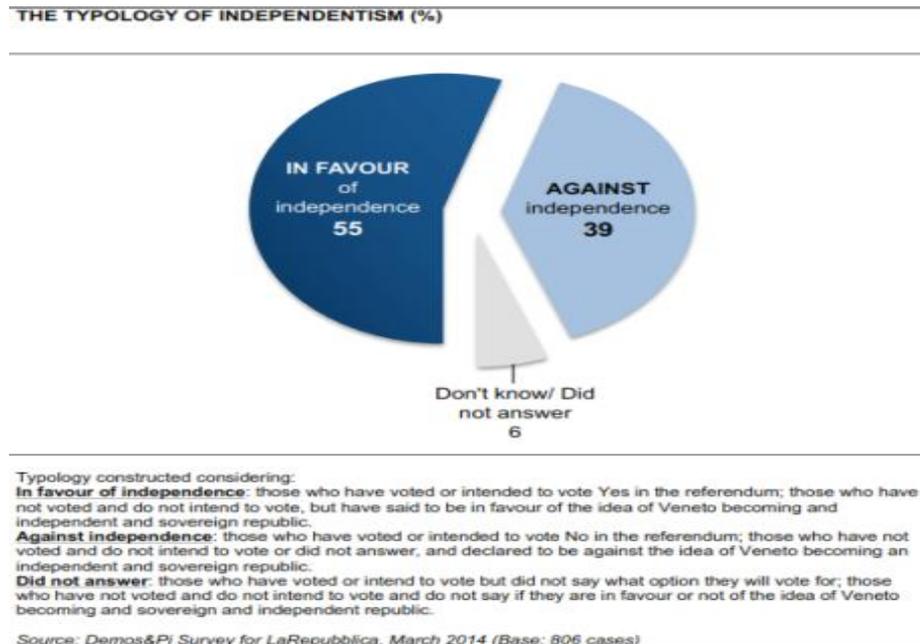
⁸² FunnyKing. *Loc.Cit*

Gianfranco Favaro (16670), Raffaele Serafini (16.627), Manuel Carraro (16.627), Gianluca Panto (16.321), dan Paolo Bernardini (16.299). Selain itu, hasil survei untuk memahami profil sosial mereka yang mendukung opsi kemerdekaan, kemudian adanya temuan survei kembali yang dilakukan oleh media negara Italia *Research Centre Demo & Pi* dan diterbitkan oleh analis politik Ilvo Diamanti di koran harian *La Repubblica* menyatakan pada hari pertama hanya 48% suara setuju kemerdekaan Venesia dan 49% suara tidak setuju dengan kemerdekaan Venesia dan 3% abstain tidak memberikan suaranya. Kemudian voting suara tersebut berkembang menjadi pada hari berikutnya menjadi 55% suara menyetujui kemerdekaan Venesia menjadi republik merdeka dan berdaulat, sedangkan 39% suara tidak menyetujui kemerdekaan tersebut dan 6% abstain atau tidak memberikan suaranya. Ini dapat dilihat pada gambar 3.1 dan gambar 3.2 dibawah ini:



Gambar 3.1 Partisipasi warga Venesia dalam survei tuntutan referendum Venesia:

Sumber: Arianna Giovannini. 2014. "Arrivederci, Veneto?". Diakses dari: <https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/arianna-giovannini/arrivederci-veneto>. [02 April 2014]



Gambar 3.2 Poling suara survei tuntutan referendum warga Venesia
 Sumber: *Ibid*

Diagram diatas menunjukkan partisipasi dan dukungan warga Venesia terhadap tuntutan referendum kemerdekaan. Dukungan suara ini datang dari pengusaha, pekerja dan yang mewakili struktur sosial tradisional daerah Venesia bukan dari kalangan generasi muda atau mahasiswa. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa kemerdekaan populer dan didukung secara khusus oleh generasi tua saja yaitu orang-orang yang telah bekerja keras untuk membuat daerah makmur. Orang-orang tersebut kini terpukul keras oleh krisis ekonomi dan kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat.⁸³ Jumlah suara dan hasilnya ini dipertanyakan oleh banyak sumber berita. Berdasarkan data situs web yang dirilis Alexa di internet tersedia untuk umum statistik lalu lintas dan penyedia serupa saja. Menurut para kritikus, sepanjang durasi jajak pendapat, website menerima sekitar 135.000 kunjungan (hanya 3,6% dari

⁸³ Arianna Giovannini. *Loc.Cit*

pemilih yang berhak). Selain itu, proporsi yang signifikan dari lalu lintas ini datang dari luar Italia, dengan 10% berasal dari Santiago, Chili sendiri.⁸⁴

Tuntutan referendum Venesia ini menambah daftar catatan pemerintah tentang daerah yang menginginkan untuk otonomi di teritorial negara demokrasi maju kawasan Eropa. Lega Nord ini adalah sebuah partai politik di Negara Italia yang menganjurkan otonomi yang lebih besar bagi wilayah di Italia utara. Pengaruh ini ditujukan dalam jajak pendapat dan menjadi pemain utama dalam politik nasional. Bahkan partai Lega Nord sendiri belum berhasil membawa revolusi otonomi daerah untuk wilayah utara Italia yang kaya dibandingkan dengan wilayah Italia selatan yang dilanda kemiskinan karena mafia pemerintahan yang melakukan korupsi. Warga Venesia memandang kemerdekaan sebuah cara untuk mengubah keadaan ekonomi daerah dengan mengambil kepemilikan hak Veneto untuk mengatur masa depannya. Selain itu, yang menarik perhatian publik warga Venesia bahwa pandangan Independentis sangat populer dan didukung oleh kalangan sayap kanan partai politik (yaitu Forza Italia sebesar 80% warga mendukung, Liga Utara sebesar 87% warga mendukung, dan tentu saja otonomis pihak/ gerakan lainnya sebesar 99%) serta kalangan pendukung Gerakan Lima Bintang yang dipimpin oleh Beppe Grillo.⁸⁵

Secara politis daerah Veneto telah lama menjadi kubu kanan-tengah, meskipun baru-baru ini Gerakan Bintang Lima menarik semakin banyak orang di wilayah Venesia. Menandakan rasa tertarik kembali terhadap partai politik arus utama pada umumnya dan Liga Utara pada khususnya. Tidak mengherankan, jika hanya minoritas (34%) dari pendukung koalisi partai pusat-kiri dan Partai Demokrat (yang memimpin pemerintah koalisi saat ini) yang mendukung kemerdekaan ini. Pada tahun 2012, Lodovico Pizzati, Gianluca Busato dan Alessio Morosin mengumpulkan lebih

⁸⁴ Admin Corriere del Veneto. 2014. “«*Indipendenza, i numeri sono falsi*»”. Diakses dari: <http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2014/26-marzo-2014/indipendenza-numeri-sono-falsi-2224268533592.shtml>. [02 Januari 2015]

⁸⁵ *Ibid*

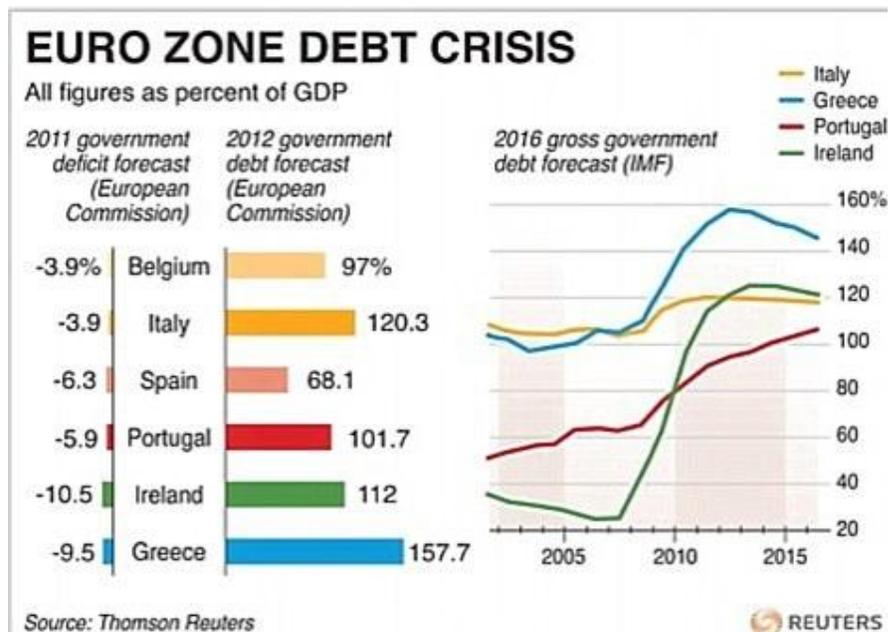
dari 20.000 tanda tangan untuk mendukung tuntutan referendum kemerdekaan dan disajikan kepada gubernur Venesia yaitu Luca Zaia.⁸⁶

Masalah lainnya menyangkut cara dimana kelompok politik *Veneto Indipendente* yang menyelenggarakan pemungutan suara melalui web platform *Plebiscito.eu*. Ketika aktivis mengadakan pemungutan suara online yang menyatakan dirinya "*Repubblica Veneta*" untuk melepaskan diri dari pemerintahan Italia ternyata hasilnya tidak sah karena suara yang dilakukan tidak mengikuti aturan konvensional yaitu orang-orang bisa memberikan suara mereka secara online, melalui telepon atau di TPS improvisasi di seluruh wilayah Venesia. Oleh karena itu, ketika panitia menyatakan dengan antusias bahwa jajak pendapat dimenangkan dengan mayoritas 89% suara (setara dengan 2,5 juta suara warga), banyak politisi dan komentator mengatakan bahwa suara itu hanya hipotetis, tidak diverifikasi, dan dinilai nol.

3.2 Dampak Krisis Ekonomi Italia Yang Semakin Besar

Italia memiliki utang yang menggunung, sebesar 120% dari GDP negara ini. level utang ini merupakan level kedua terbesar setelah Yunani. Terlebih lagi negara Italia mempunyai utang sebesar 335 milyar Euro yang jatuh tempo pada tahun 2012, lebih banyak daripada Yunani, Irlandia, dan Portugal jika digabungkan bersama. Italia harus meminjam ratusan milyar, padahal Italia merupakan salah satu anggota negara-negara industrial G7, dan ekonomi ketiga terbesar di Zona Eropa. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.3 dibawah ini:

⁸⁶ Gianluca. 2014. "*Veneto: Consegnato Alla Regione Le Firme Per Referendum*". Diakses dari: <http://www.miglioverde.eu/veneto-consegnate-alla-regione-le-firme-per-referendum/>. [28 Maret 2015]



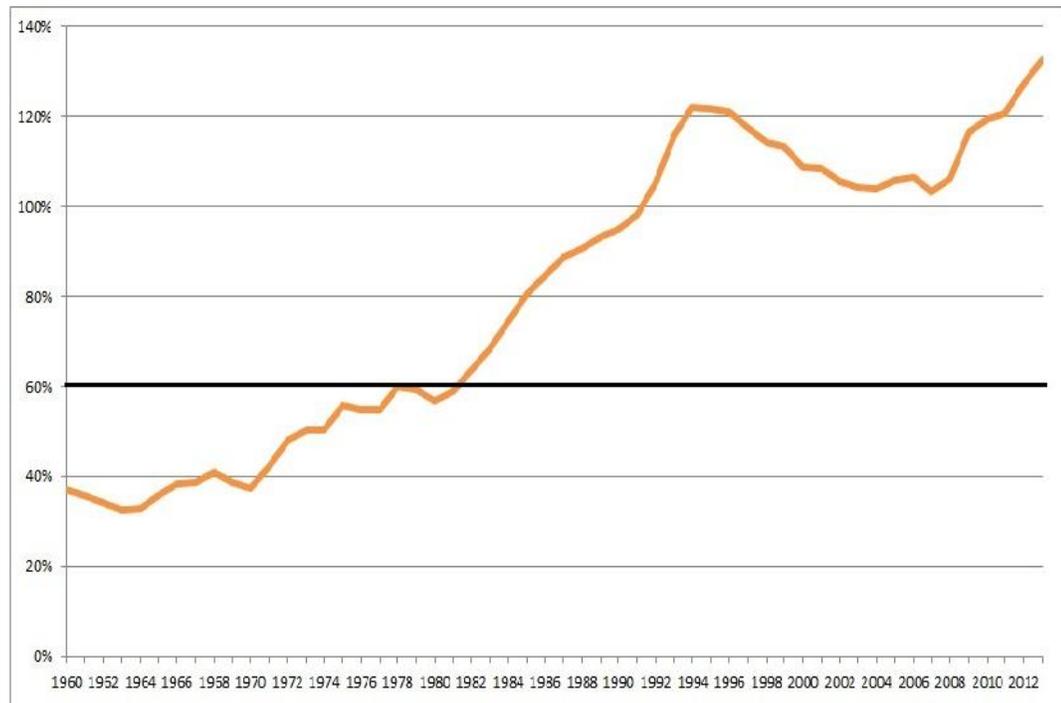
Gambar 3.3 GDP Italia tahun 2012

Sumber: Adrian Lowery. 2011. "Eurozone crisis enters new phase as Italy teeters on brink of insolvency with borrowing costs soaring past 'point of no return". Diakses dari <http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-2058529/Eurozone-crisis-enters-new-phase-Italy-teeters-brink-insolvency-borrowing-costs-soaring-past-point-return.html>. [28 Maret 2014]

Krisis ekonomi di negara Italia membawa pengaruh yang sangat besar terhadap Eropa. Pemicu dari ketidakpastian pasar Eropa adalah ketidakstabilan pemerintahan Roma. Kapitalisme Italia ada di belakang pesaing-pesaing utamanya. Kelemahan ini tertutupi oleh ledakan kapitalisme pasar, tetapi terekspos oleh krisis finansial global.⁸⁷ Semenjak mulainya krisis ini, Italia hanya bisa tumbuh 1% tiap tahunnya. Pada kuartal pertama 2011, pertumbuhannya hanya 0.1%, jauh di bawah rata-rata Zona Eropa 0.8%, tanpa prospek pemulihan.⁸⁸ Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini (Data: IMF).

⁸⁷ Paulus Teguh Kurniawan. 2012. "Kapitalisme: Penyebab Krisis Ekonomi Global ?". Diakses dari: <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/08/21/kapitalisme-penyebab-krisis-ekonomi-global-487765.html>. [28 Maret 2014]

⁸⁸ Admin Militan. 2012. "Perspektif Dunia 2012. Bagian II (Krisis Kapitalisme Eropa)". Diakses dari: <http://www.militanindonesia.org/internasional/eropa/8321-perspektif-dunia-2012-bagian-ii-krisis-kapitalisme-eropa.html>. [21 Mei 2014]



Gambar 3.4 Grafik kinerja utang publik Italia terhadap PDB setelah 1960-2012

Sumber: Stefania Fabrizio. 2008. "Should Italy Sell Its Nonfinancial Assets to Reduce the Debt?". Diakses dari: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/pdp/2008/pdp01.pdf>. [25 November 2014]

Dari gambar diagram diatas jelas terlihat kinerja utang publik Italia yang semakin meningkat. Silvio Berlusconi yang telah memperoleh empat kali posisi sebagai perdana menteri sejak legislatif XII (1994) dalam dua periode berturut-turut XIV (2001-2005 dan 2005-2006) dan akhirnya pada XVI (2008 -2011)⁸⁹ tidak dapat melakukan apa-apa untuk membendung gejolak krisis ekonomi yang melanda Italia. Program-program ekonomi pemerintahan PM Silvio Berlusconi tidak mampu untuk mengatasi krisis Italia yang semakin besar. Program Silvio Berlusconi dianggap terlalu kecil untuk para bos-bos dan terlalu besar untuk para buruh. Parlemen Italia meloloskan paket penghematan 54,2 miliar *Euro* dari pemerintahan PM Silvio

⁸⁹ AFP. 2013. "Silvio Berlusconi: Timeline of His Political Career". Diakses dari: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/silvio-berlusconi/10477658/Silvio-Berlusconi-timeline-of-his-political-career.html>. [27 Desember 2014]

Berlusconi, namun hal ini berdampak pada demonstrasi dan pemogokan umum para pekerja.

Krisis pemerintah Italia mengakibatkan kemiskinan anak, sedikitnya 10,3% pasangan dengan tiga anak atau lebih hidup dibawah garis kemiskinan pangan. kelompok yang berpenghasilan rendah dan menghadapi kesulitan untuk memperoleh makanan sehat yang seimbang, Sebanyak 3,5 juta jiwa warga negara Italia bagian selatan hidup dibawah garis kemiskinan pangan. Krisis ekonomi ini juga berdampak buruk terhadap lapangan pekerjaan di Italia kondisi pasar tenaga kerja di Italia semakin melemah dengan meningkatnya pengangguran dari 6,2% pada 2007 menjadi 8,4% pada 2011. Krisis ekonomi ini selain dipicu permasalahan utang publik juga diakibatkan pada kebijakan pemerintahan Berlusconi yang cenderung monopoli di beberapa industri ekonomi sehingga mengakibatkan kurang sehatnya persaingan ekonomi. Perekonomian Italia di bawah pemerintahan Silvio Berlusconi sebagai Perdana Menteri Italia mengalami kelambatan dalam perkembangannya. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Berlusconi melalui Menteri Keuangan Giulio Tremonti tidak berjalan dengan semestinya dimana tujuan kebijakan itu untuk menyediakan sumber daya ekonomi bagi masyarakat miskin di Italia.⁹⁰ Kebijakan lain yang tak kalah pelik yaitu pemerintahan Italia menaikkan tarif pajak. PM Silvio Berlusconi menerapkan kebijakan penghematan dengan melakukan pemotongan anggaran, yaitu paket pemotongan sebesar 45 miliar euro direncanakan sebagai penyeimbang anggaran untuk tahun 2013 ditujukan dengan memangkas belanja publik dan pengurangan pekerjaan. Kebijakan ini mengakibatkan jutaan anggota pekerja di Italia melakukan pemogokan sebagai protes terhadap kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Silvio Berlusconi tersebut. Karena menurut para pekerja kebijakan tersebut justru akan memudahkan proses pemecatan

⁹⁰ Trading Economics. 2015. "*Italy Unemployment Rate 1983-2015*". Diakses dari: <http://www.tradingeconomics.com/italy/unemployment-rate>. [25 maret 2015]

pekerja.⁹¹ Pemerintah menambahkan pajak pendapatan nilai (PPN) satu persen untuk item sebesar 10% dan 21% tarif pajak penghasilan, kemudian selama kurung waktu dua tahun menjadi -1% terendah lebih sedikit pemotongan pajak penghasilan, tetapi kebijakan ekonomi tersebut dibatalkan oleh parlemen. Parlemen Italia mengadopsi serangkaian langkah-langkah penghematan darurat yang diantaranya adalah kenaikan pajak yaitu, pajak BBM, pajak atas barang mewah, pajak property (IMU), PPN+2%, serta pajak pendapatan perusahaan. Tujuan dari kenaikan pajak ini yaitu selain untuk meningkatkan kembali aktivitas ekonomi Italia kebijakan kenaikan pajak ini juga bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur pemerintahan.⁹²

Kebijakan dan program – program Silvio Berlusconi berhenti setelah pada tanggal 21 Desember 2010. Silvio Berlusconi menjalani proses penyelidikan oleh jaksa Milan terkait kasus skandal yang disebut "Rubygate", dengan tuduhan eksploitasi pelacuran anak dan berhubungan seks di bawah umur dengan penari klub malam Karima El Mahroug. Presiden Giorgio Napolitano mengintervensi dan meminta Berlusconi untuk mundur dari jabatannya.⁹³ Dengan mundurnya Perdana Menteri Silvio Berlusconi, Presiden Giorgio Napolitano kemudian mengangkat Mario Monti menjadi seorang senator seumur hidup dan segera memberinya tugas untuk membentuk pemerintahan yang baru. Pemerintahan terbentuk dari para anggota "Partai Teknokrat", sedangkan calon-calon yang berasal dari bankir, pengacara, dan pakar-pakar yang tidak terpilih. Tugas yang diberikan dari pemerintahan adalah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan penghematan dengan cepat. Awalnya pemerintahan ini mendapat dukungan dari semua kelompok politik di parlemen Italia, kecuali Liga Utara.⁹⁴

⁹¹ John Foot. 2011. "*Silvio Berlusconi may have screwed Europe – not just Italy*". Diakses dari; <http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/jul/13/silvio-berlusconi-europe-italy-economic-problems>. [27 Maret 2015]

⁹² Elisa Gencig. 2012. "*Italy's Economy In The Euro Zone Crisis And Monti's Reform Agenda*". Berlin, Germany. Hal. 32- 40

⁹³ Ervan Hardoko. *Loc.Cit*

⁹⁴ Admin Militan. *Loc.Cit*

Penunjukan terhadap Mario Monti ini ketika berakhir tugas ketiga Silvio Berlusconi sebagai perdana menteri pada tahun 2008-2011. Partai Forza Italia dan Partai Rakyat Liberal (PDL) koalisi partai tengah kanan dibawah pimpinan Perdana Menteri Silvio Berlusconi menarik kembali dukungannya terhadap Pemerintahan teknokrat pimpinan Perdana Menteri Mario Monti pada akhir tahun 2012, sehingga memaksa dia mengundur diri pada awal Januari 2013. Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Mario Monti menambah panjang permasalahan Italia. Selama 15 bulan dibawah pimpinan pemerintahan PM Mario Monti, suku bunga obligasi berjangka 10 tahun dari Italia telah turun lebih dari 200 poin basis. Akan tetapi, semua kebijakan yang dijalankan pada periode PM Mario Monti telah menjerumuskan perekonomian negara Italia terperangkap pada gelombang resesi yang paling panjang selama 20 tahun.⁹⁵ Dinamika penggunaan GDP negara Italia tahun 2013 yang dibuat oleh Mario Monti dapat dilihat gambar tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Indikator Keuangan Publik Dalam Persentase Dari GDP Italia

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
UPDATED POLICY SCENARIO						
Net borrowing	-4.6	-3.9	-1.7	-0.5	-0.1	0.0
Net structural borrowing (1)	-3.6	-3.6	-0.4	0.6	0.6	0.4
Structural change	-0.4	0.0	-3.2	-1.0	0.0	0.2
Primary surplus	0.0	1.0	3.6	4.9	5.5	5.7
Primary structural surplus (1)	1.0	1.3	4.9	6.1	6.2	6.1
Public debt	118.6	120.1	123.4	121.5	118.2	114.4
Public debt (net of EU Area financial support) (2)	118.3	119.2	120.3	117.9	114.5	110.8
MEMO: Report to Parliament (3)						
Net borrowing	-4.6	-3.8	-1.2	0.1	0.4	
Structural net borrowing (1)	-3.5	-3.2	-0.1	1.1	1.0	
Structural change	-0.5	-0.3	-3.1	-1.2	0.1	
Public debt (2)	118.4	119.8	120.1	117.5	113.9	

1) Net of one-off measures and the cyclical component. Estimates prepared on the basis of national accounting data available as of December 2011.
2) Net of direct loans to Greece, Italy's portion of ESFS liabilities and Italy's portion of ESM capital for the years from 2010 to 2015.
3) The projected data have not been published.

Sumber: Cabinet Parliament Italy. 2012. "Economic and Financial Document 2012 Section 1 Italy Stability Programme". Italy. Hal. 5

⁹⁵ Anh Huyen. 2013. "Eurozone menghadapi bahaya krisis baru". Diakses dari: <http://vovworld.vn/id-id/Ulasan-Berita/Eurozone-menghadapi-bahaya-krisis-baru/140503.vov>. [18 April 2014]

Masalah krisis ekonomi yang melanda sebagian wilayah Eropa merupakan salah satu faktor pendorong timbulnya tuntutan referendum. Italia yang berada di kawasan itu tak luput pula atas jeratan hutang publik yang semakin meningkat. Pemerintahan Italia pada masa pemerintahan PM Berlusconi sampai dengan pemerintahan PM Mario Monti melakukan pemangkasan anggaran. Menteri keuangan Giulio Tremonti telah memotong subsidi untuk warga Venesia selama tiga tahun terakhir dari pemerintahan pusat. Warga Venesia mencurigai hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk mengurangi utang pemerintah.⁹⁶ Mundurnya PM Silvio Berlusconi ditengah terpuruknya perekonomian Italia digantikan dengan Mario Monti, upaya yang dilakukan oleh PM Mario Monti sama halnya dengan yang dilakukan oleh Berlusconi yaitu Monti menerapkan pemotongan belanja negara yang diterapkan pada Juli 2012 yang meliputi seluruh bidang pemerintahan dan bagian umum yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik pada kualitas yang sama dan harga yang lebih rendah.⁹⁷

Pemerintahan PM Mario Monti juga melakukan reformasi pensiun dan reformasi ini paling ditentang oleh parlemen karena dianggap sangat merugikan tenaga kerja di Italia. PM Mario Monti menerapkan meningkatkan usia pensiun, menghentikan biaya penyesuaian hidup untuk sebagian besar tenaga kerja pensiun, serta membayar biaya pensiun berdasarkan kontribusi pekerja bukan berdasarkan besar gaji saat pensiun. Selanjutnya, insentif pajak penghasilan untuk investasi PM Mario Monti memberlakukan pajak penghasilan yang sangat tinggi yaitu melebihi pajak penghasilan yang diberlakukan di Inggris, Spanyol dan Jerman. PM Mario Monti menerapkan jaminan publik untuk pinjaman UKM dan mengurangi jumlah pegawai negeri.⁹⁸ Kebijakan lain yaitu menaikkan pajak terhadap bank dan perusahaan asuransi diperkirakan akan menaikkan 1,8 miliar Euro selama tiga tahun

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Elisa Gencig. *Op.Cit.* Hal. 32-40

⁹⁸ Cabinet Parliament Italy. *Op.Cit.* Hal. 7

ke depan. Rencananya meningkatkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 0,75 poin persentase untuk bank dan dua poin persentase untuk perusahaan asuransi.

Tahun ini otoritas pajak memperingatkan bahwa pihaknya berencana untuk mengejar 50 miliar Euro pajak yang belum dibayar pada situasi itu cenderung memburuk setelah pemerintah sepakat untuk meningkatkan pajak capital gain (CGT) dari 12,5% menjadi 20%. Pemotongan Pendidikan dan kenaikan CGT adalah bagian dari 45.5 miliar Euro dari paket kebijakan yang dirancang untuk menyeimbangkan anggaran dan mencoba untuk meyakinkan investor negara dengan mengurangi utang terbesar kedua di kawasan Eropa. Pemotongan lebih lanjut kepada pemerintah lokal dan regional juga direncanakan untuk hemat sembilan milyar Euro lebih dari dua tahun bersama dengan pajak lima persen tambahan pada orang yang mempunyai pendapatan lebih dari 90.000 ribu Euro per tahun dan 10% pada pendapatan melebihi 150.000 ribu Euro. Tremonti mengatakan kepada Venesia bahwa komitmen sebelumnya untuk membangun penghalang banjir yang bernama Musa sebesar tiga milyar Euro yang terdiri dari 78 gerbang baja raksasa dan akan selesai pada tahun 2014 berarti mengakhiri semua subsidi lainnya.⁹⁹

3.3 Krisis Politik Pemerintahan Italia Akibat Seringnya Pergantian Perdana Menteri

Dalam kurun waktu dari tahun 2011-2014 Italia telah mengganti perdana menteri sebanyak empat kali, PM Silvio Berlusconi telah meraih kekuasaan sebagai perdana menteri dengan partai baru, "Wilayah Kebebasan Koalisi". Namun, koalisi ini terbukti menjadi rapuh dan kehilangan dukungan dari rekan-rekannya di Lega Nord sehingga memaksa Silvio Berlusconi untuk mundur. Pada tahun 2011 pemilu nasional baru diadakan dan kali ini Silvio Berlusconi kembali berkuasa dengan, koalisi tengah-kanan baru yang disebut '*Freedom House*'. Itu dibuat dengan pihak

⁹⁹ Phillip Inman. 2011. "*Venetians see their economy sink as subsidies dry up*". Diakses dari: <http://www.theguardian.com/business/2011/aug/28/venice-government-subsidies-cuts>. [27 Maret 2015]

Berlusconi sendiri yang terdiri dari partai Forza Italia, partai Aliansi Nasional, partai Liga Utara, partai pusat Demokrat Kristen, dan partai pusat Demokrat Union. Pemerintah ini berlangsung untuk waktu yang sangat panjang, sampai pemilihan baru 2006 ketika Romano Prodi yang nyaris kembali berkuasa.¹⁰⁰ Silvio Berlusconi berjanji untuk mengurangi pengangguran, Namun selang beberapa waktu berkuasa, Silvio Berlusconi dituduh mempunyai hubungan dengan mafia, terkait dengan kasus penipuan pajak dan penyuapan. PM Silvio Berlusconi berada dibawah dakwaan jaksa untuk kasus penipuan pajak dan penyuapan serta terbukti bersalah, namun ia dibebaskan dalam dengan pengajuan banding. Beberapa kasus lain yang tertunda pada bulan Januari 2011 yang mengakibatkan mahkamah konstitusi Italia mencabut kekebalan hukum Berlusconi. Silvio Berlusconi yang dihukum karena menerima suap untuk kesaksian palsu. Pada Februari 2011, jaksa penuntut di Milan mengajukan tuntutan pidana terhadap Berlusconi atas tuduhan prostitusi dan penyalahgunaan jabatan.¹⁰¹

Kekecewaan warga kota Venesia atas kasus-kasus tersebut menyerukan untuk melakukan tuntutan referendum. Partai Indipendenza Veneta yang menjadi "dalang" usulan tuntutan referendum ini melakukan pemungutan suara survei secara online sebagai ide untuk melepaskan diri dari Italia. Warga Venesia menganggap pemerintah pusat Italia ternyata tidak mampu memberantas korupsi dan melindungi rakyatnya dari resesi ekonomi. "Kami tak ingin lagi menjadi bagian sebuah negara yang sudah menabrak tembok. Tak ada yang bekerja lagi di negara ini," kata koordinator partai, Nicola Gardin. Italia terbenam dalam utangnya, ribuan bisnis tutup, bahkan jumlah orang yang bunuh diri sudah tak terhitung.¹⁰² Penduduk

¹⁰⁰ U.S.State Dept. 2011. "Country Notes: Italy". Diakses dari: <http://www.factmonster.com/ipka/A0107658.html>. [27 Maret2014]

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Ervan Hardoko. *Loc.Cit*

Venesia kecewa dan tidak puas dengan kebijakan pemerintah Italia yang dianggap merugikan penduduk Venesia.¹⁰³

Menjelang akhir tahun 80-an dan 90-an, korupsi telah menjadi endemik dalam politik Italia. Pada bulan November 2011 perdana menteri Mario Monti mengambil alih sebagai kepala pemerintahan teknokrat setelah perdana menteri Silvio Berlusconi mengundurkan diri di tengah krisis utang nasional yang terus meningkat.¹⁰⁴ Namun akhir tahun 2012 perdana menteri Monti juga mengajukan pengunduran diri sebagai perdana menteri Italia sesuai janjinya untuk lepas jabatan setelah anggarannya diterima parlemen hal ini dilakukan setelah dua hari setelah partai mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi menarik dukungannya terhadap pemerintahan.¹⁰⁵ Presiden Giorgio Napolitano menerima pengunduran dirinya dan meminta Monti untuk tetap sebagai kepala pemerintahan sementara hingga pemilu yang diperkirakan akan berlangsung 24 Februari 2013. Ketidakjelasan politik di Italia ini menimbulkan ketidakpastian pula bagi para investor.¹⁰⁶ Presiden Giorgio Napolitano menunjuk politisi kiri Enrico Letta menjadi perdana menteri baru Italia. Presiden Giorgio Napolitano menunjuk politisi kiri Enrico Letta menjadi PM baru Italia. Ia menerima penunjukkan ini dengan syarat, kata Letta se usai pembicaraan dengan Presiden Napolitano. Politisi sosial demokrat Enrico Letta diharapkan mengakhiri krisis politik di Italia.¹⁰⁷ Tetapi pada tanggal 14 Februari 2014 pemerintah Italia dikejutkan kembali dengan berita pengunduran diri Perdana Menteri Italia Enrico Letta di tengah krisis politik negara itu. Letta mengatakan bahwa ia akan mengajukan permohonan

¹⁰³ Admin Tempo. 2014. " *Venice Gelar Referendum untuk Merdeka dari Italia*" diakses dari: <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/18/117563208/Venice-Gelar-Referendum-untuk-Merdeka-dari-Italia>. [28 Maret 2014]

¹⁰⁴ Alberto Toscano. 2013. " *Italy's latest coalition crisis is a morbid symptom of deeper political malaise*". Diakses dari: <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/01/italy-coalition-crisis-silvio-berlusconi>. [30 Maret 2014]

¹⁰⁵ Joe. 2012. " *Monti Segera Mundur*". Diakses dari: <http://tekno.kompas.com/read/2012/12/10/02352267/monti.segera.mundur>. [02 April 2014]

¹⁰⁶ BBC.com. 2012. " *PM Italia Mario Monti resmi mundur*". Diakses dari: http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/12/121222_pmitalia_mundur.shtml. [28 maret 2014]

¹⁰⁷ Admin DW. 2013. " *Enrico Letta Perdana Menteri Baru Italia*". Diakses dari: <http://www.dw.de/enrico-letta-perdana-menteri-baru-italia/a-16768296>. [28 maret 2014]

mundur kepada Presiden Giorgio Napolitano usai sidang kabinet terakhir yang dimulai pada pukul 10.30 waktu setempat. Hal itu sudah menjadi keputusannya setelah menjabat selama kurang dari setahun¹⁰⁸. Enrico Letta mengundurkan diri setelah mendapatkan kritikan keras dari para pesaing politiknya, hal ini dilakukan jelang satu tahun jabatannya.

Pada tanggal 22 Februari 2014 pemerintah Italia resmi mempunyai Perdana Menteri (PM) baru. Matteo Renzi disumpah menjadi PM Italia diharapkan menghadapi tekanan untuk menunjukkan hasil cepat setelah perdana menteri sebelumnya mundur karena laju reformasi ekonomi yang lambat. Politisi kiri tengah Italia tersebut menduduki posisi terhormat itu pada usia 39 tahun. Pemimpin koalisi partai kiri-tengah (Demokrat) itu mengambil alih pemerintahan di negeri dengan perekonomian terbesar ketiga Uni Eropa itu di saat resesi ekonomi mendera negeri itu. "Ini adalah tugas yang sulit dan berat. Tapi kami adalah Italia, kami akan sukses. Kami akan tetap jujur, bebas, dan sederhana," kata Matteo Renzi lewat akun Twitter-nya.¹⁰⁹ Kabinetnya yang terdiri atas 16 menteri dengan rata-rata usia di bawah 48 tahun adalah kabinet terkecil dan termuda dalam sejarah kini Italia. Kabinet baru bentukan perdana menteri ketiga Italia yang diangkat tanpa pemilihan umum itu akan melakukan pertemuan pertama. Pemimpin usaha dan serikat pekerja telah berulang kali mengingatkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah penting untuk menyelamatkan Italia dari industri yang memburuk dengan ribuan perusahaan tidak bisa melanjutkan bisnis dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. "Tanggung jawab yang sangat besar dan ini tidak boleh gagal," kata Rocco Palombella, sekretaris jenderal serikat UILM yang mewakili pekerja sektor teknik kepada perdana menteri Matteo Renzi seperti dikutip kantor berita Reuters.

¹⁰⁸ Sulaiman. 2014. "*Krisis Politik, PM Italia Mengundur diri*". Diakses dari: <http://lampost.co/berita/krisis-politik-pm-italia-mengundur-diri>. [27 Maret 2014]

¹⁰⁹ Denny Armandhanu. 2014. "*Presiden Italia Minta Wali Kota Florence Jadi Perdana Menteri*". Diakses dari: <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/482254-presiden-italia-minta-wali-kota-florence-jadi-perdana-menteri>. [20 Maret 2014]

3.4 Faktor Sejarah Yang Mendorong Gerakan Referendum Venesia

Gerakan referendum Venesia tidak lepas dari faktor sejarah yang mempengaruhi. Pada tanggal 8 Februari 2011, media massa *Corriere del Veneto* melaporkan bahwa pada tahun 1866 kerajaan Italia menganeksasi bagian tersisa dari kerajaan Lombardy - Venetia (termasuk saat Veneto, Friuli, dan provinsi Mantua), dimana saat itu Venesia masih berada dibawah kekuasaan Austria.¹¹⁰ Bergabungnya wilayah Venesia masuk dalam kerajaan Italia karena aneksasi penggabungan wilayah tersebut yang menginginkan undang-undang otonomi daerah. Keinginan otonomi daerah tersebut terinspirasi dari karya berjudul “Orang Venesia” pada tahun 1971 yang kemudian ditulis ulang pada tahun 2011 menyebutkan bahwa Veneto merupakan "daerah otonom". Dalam pasal 2 karya tersebut juga disebutkan bahwa "pemerintahan sendiri dari rakyat Veneto diimplementasikan dalam bentuk yang sesuai dengan fitur dan tradisi sejarah”. Hal ini tidak terlepas dari kondisi daerah ini yang dalam sejarahnya juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan warisan linguistik dan budaya masyarakat.¹¹¹ Pada tahun 2010 undang-undang sebagai daerah otonomi daerah untuk Venesia dibatalkan yang mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010 oleh dekrit pemerintah Italia. Pembatalan undang-undang daerah otonom bagi wilayah Venesia ini kemungkinan besar karena kesalahan pemerintah. Hal ini yang kemudian juga turut mendorong kelompok-kelompok independen untuk mengejar gugatan kemerdekaan atas Venesia.¹¹²

Lebih lanjut mengenai sejarah yang mendorong munculnya tuntutan referendum, pada tahun 1998 dewan daerah Venesia menyetujui resolusi 42 tentang

¹¹⁰ Alessio Antonini. 2011. *”Abrogata per errore dal governo l’annessione del Veneto all’Italia”*. Diakses dari: <http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2011/8-febbraio-2011/abrogata-errore-governo-l-annessione-veneto-all-italia-181421237045.shtml>. [27 Maret 2014]

¹¹¹ Admin Consiglio regionale del Veneto. 2013. *“Statute of the Veneto Region”*. Diakses dari: <http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=90&p=95&c=6&e=125&t=0&>. [02 Februari 2015]

¹¹² *Ibid*